

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ATAS

**LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DI

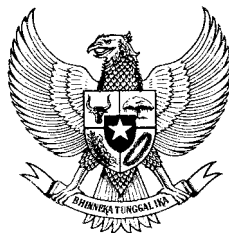
MEDAN

**Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2004**

**PERWAKILAN I BPK-RI
DI MEDAN**

Nomor : /S/XIV.1/ /2005

Tanggal :



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Imam Bonjol No. 22 Telp. (061) 4519039 Fax (061) 4538140 Medan 20152

Kepada Yth.

- 1. Badan Pengawas PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara**
- 2. Direksi PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara**

di

Medan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit neraca PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas, dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan

pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Joseph Sinaga, SE.Ak
Register Negara No. D-12142

Medan, 3 Juni 2005

2.5 Sejarah singkat PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

2.5.1 Pendirian

PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 16 tanggal 19 Juli 1979 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Sumatera Utara yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan SK Nomor Pem-10/64/28-295 tanggal 29 September 1979. Terakhir disempurnakan dengan PERDA Nomor 24 tanggal 27 Juli 1985 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Dati I Sumatera Utara yang disahkan dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 539.22-1434 tanggal 16 Oktober 1985.

2.5.2 Kegiatan Perusahaan

Tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sesuai dengan PERDA Nomor 16 tahun 1979 dan Nomor 24 tahun 1985 sebagai berikut.

- Tujuan Perusahaan : Mengembangkan perekonomian daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
- Lapangan Usaha : Melakukan semua usaha yang bergerak dalam bidang perkebunan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tempat Kedudukan : Medan dan dapat mempunyai unit usaha di tempat lain.

2.5.3 Organisasi dan Personalia

- a) Struktur Badan Pengawas disusun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 539/030-K/2004, yaitu:

Badan Pengawas

- (1) Ketua : Drs. Muhyan Tambuse
(Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara)
- (2) Sekretaris : Ir. Syaifullah, MM
- (3) Anggota : Ayub Prabisma, SH
Ir. Walfred L. Tobing
Ir. Batara Girsang

- b) Struktur organisasi PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, yang telah

beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Nomor 697 A/DIR-G/PDP/1997 tanggal 13 Nopember 1997, dengan susunan sebagai berikut.

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) D i r e k t u r | : Ir. Heriati Chaidir |
| (2) Kepala Bagian Umum | : Ir. Elfina Hasibuan |
| (3) Kepala Bagian Tanaman/
Produksi/Teknik/Pengolahan | : Ir. Wesli Suriyono |
| (4) Kepala Bagian Keuangan | : Sahabat Ali, SE.Ak. |
| (5) Satuan Pengawas Intern | : Zahri Fadli,SE. |
| (6) Administratur Kebun Tg. Kasau | : Ir. Andi Mulia S. |
| (7) Administratur Kebun Sei Kari | : Ir. Buhari Tumulo |
| (8) Administratur Sp. Gambir | : Darwin Sembiring |
| (9) Administratur Kebun Patiluban | : Abdul Muthalib Pane |
| (10) Pegawai Staff | : 38 Orang |
| (11) Pegawai Bergolongan | : 46 Orang |
| (12) Karyawan SKU | : 957 Orang |

2.6 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Prinsip Akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada Kongres Bandung tahun 1995 tanggal 22 Desember 1995 dan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha (laporan laba rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan (neraca) dilakukan dengan metode modifikasi.

Laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan klasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2.6.2 Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan perusahaan dilakukan dalam mata uang rupiah penuh. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan yang berhubungan dengan mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs dikredit atau dibebankan

pada Laba (Rugi) tahun berjalan. Pembayaran angsuran Hutang Jangka Panjang dalam Valuta Asing yang merupakan penerusan pinjaman pemerintah, dilakukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada saat pencairan pinjaman.

2.6.3 Pengakuan Pendapatan dan Biaya

2.6.3.1 Pendapatan

Pendapatan utama adalah hasil penjualan karet dan kelapa sawit yang dilakukan berdasarkan kontrak penjualan. Penjualan diakui sebagai pendapatan pada saat barang diserahkan kepada pembeli atas dasar *delivery order*.

2.6.3.2 Biaya

Biaya-biaya dibebankan pada saat terjadinya yang terdiri atas:

- Harga pokok penjualan yaitu semua biaya produksi yang dibebankan pada hasil produksi yang dijual.
- Biaya produksi dan pengolahan adalah semua biaya eksploitasi yang dikeluarkan di kebun dan pabrik.
- Biaya operasi adalah biaya-biaya administrasi dan umum yang diperlukan di kantor Direksi. Biaya ini tidak dialokasikan ke Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).
- Pendapatan dan biaya di luar usaha pokok diklasifikasikan sebagai pendapatan dan biaya lain-lain.

2.6.4 Metode penilaian Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinilai sebagai berikut.

- Aktiva yang diperoleh sampai dengan tanggal 15 November 1978 dinilai berdasarkan hasil penilaian kembali pada tahun 1979, sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979 dengan modifikasi khusus untuk tanaman berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-256/MK/04/1980, tanggal 12 Maret 1980.
- Aktiva yang diperoleh setelah penilaian kembali tanggal 1 Januari 1979 dinilai dengan harga perolehan.

Perbedaan nilai hasil penilaian kembali tahun 1979 tersebut dibukukan dalam rekening “Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap” dalam kelompok modal dan

cadangan.

Metode penyusutan aktiva tetap sejak tahun 1984 disesuaikan dengan Undang-undang PPh tahun 1984, yakni:

- Golongan I, penyusutan 50% per tahun dari nilai buku.
- Golongan II, penyusutan 25% per tahun dari nilai buku.
- Golongan III, penyusutan 10% per tahun dari nilai buku.
- Golongan IV, penyusutan 5% per tahun dari nilai perolehan atau penilaian kembali 1 Januari 1979.

Penyusutan aktiva tetap mulai dihitung pada periode aktiva tetap diterima atau selesai dibangun dengan penyusutan satu tahun penuh. Penyusutan tanaman mulai dihitung dan dibebankan sejak tanaman tersebut mulai menghasilkan dengan tarif penyusutan golongan IV. Biaya penyusutan yang menjadi beban biaya produksi adalah penyusutan aktiva tetap kebun, sedangkan penyusutan aktiva tetap di kantor Direksi dibebankan kepada biaya usaha.

2.6.5 Penyisihan Piutang Sangsi

Terhadap piutang niaga dan piutang lain-lain yang telah berumur lebih dari 1 tahun dan diragukan penyelesaiannya, dilakukan penyisihan piutang yang dibebankan ke biaya di luar biaya usaha.

2.6.6 Metode Penilaian Persediaan

2.6.6.1 Persediaan hasil produksi atas harga pokok rata-rata yang berlaku sama untuk semua jenis hasil produksi.

Perhitungan harga pokok rata-rata per satuan sebagai berikut.

$$\frac{(BL + BTL + \text{Penyusutan aktiva tetap})}{\text{Jumlah hasil produksi}}$$

Jumlah hasil produksi

(BL = Biaya Langsung, BTL = Biaya Tidak Langsung/Umum)

2.6.6.2 Persediaan bahan pelengkap dinilai atas dasar harga pembelian rata-rata bergerak untuk tiap jenis bahan pelengkap.

2.6.7 Aktiva Lain-lain

Yang digolongkan ke dalam aktiva lain-lain adalah aktiva yang karena sifatnya atau keadaannya tidak tergolong sebagai aktiva lancar dan aktiva tetap, seperti piutang ragu-ragu, aktiva tetap atau tanaman yang rusak dan biaya yang ditanggihkan,

bangunan dalam penyelesaian, pembibitan dan tanaman dalam proses penanaman. Terhadap biaya yang ditanggihkan, secara berangsur diamortisasikan.

2.6.8 Metode Kapitalisasi Inventaris

Inventaris berupa berbagai peralatan yang terbuat dari berbagai bahan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dan harga perolehan per unit yang telah ditentukan, dikapitalisasi (*Capital Expenditure*) dan jika masa manfaat kurang dari satu tahun tanpa memperhatikan harga perolehan per unit, langsung menjadi biaya operasional tahun berjalan.

2.6.9 Kapitalisasi Bunga Hutang Jangka Panjang

Bunga Hutang Jangka Panjang yang digunakan untuk pengembangan tanaman dikapitalisasi ke dalam tanaman belum menghasilkan serta aktiva non tanaman yang bersangkutan selama masa pengembangan dan pembangunan.

2.6.10 Pembagian Laba

Pembagian laba berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1985 tanggal 27 Juli 1985 adalah sebagai berikut.

- Bagian Pemda Provinsi	: 55 %
- Cadangan Umum	: 25 %
- Tunjangan Hari Tua Pegawai	: 10 %
- Jasa Produksi	: <u>10 %</u>
Jumlah	: <u>100 %</u>

Cadangan lain-lain sejak tahun 1984 telah ditiadakan dan saldo per 31 Desember 1983 sejumlah Rp521.677.188,00 dialihkan menjadi cadangan umum guna menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 1979.

Pembagian Jasa Produksi kepada Direksi, staf karyawan dan pimpinan unit diberikan sebesar 70 % sedangkan kepada Badan Pengawas Perusahaan diberikan sebesar 30 % sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 539/1013/K/tahun 2003.

2.6.11 Modal

Modal perusahaan menurut Perda Nomor 16 tahun 1979 berjumlah Rp76.004,00. Kemudian sesuai Perda Nomor 4 tahun 2004, modal dasar yang disetor sampai dengan 31 Desember 2004 berjumlah Rp14.000.000.000,00. Jumlah modal tersebut seluruhnya telah disetor.

2.7 Penjelasan Pos-pos Neraca dan Laba Rugi

2.7.1 Penjelasan Pos-pos Neraca

2.7.1.1 Kas dan Bank

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp4.659.326.948,00 dan Rp2.495.773.012,00,00 terdiri dari:

	31 Desember 2004	31 Desember 2003
	(Rp)	(Rp)
- Saldo Kas	33.476.554,00	42.339.895,00
- Saldo Bank	4.625.850.394,00	2.453.433.117,00
Jumlah	4.659.326.948,00	2.495.773.012,00

Saldo Kas meliputi:

	31 Desember 2004	31 Desember 2003
	(Rp)	(Rp)
- Kantor Direksi Medan	2.496.438,00	585.282,00
- Kebun Tanjung Kasau	17.326.384,00	24.064.730,00
- Kebun Sei Kari	13.158.264,00	5.435.109,00
- Kebun Simpang Gambir	200.889,00	4.539.597,00
- Kebun Patiluban	294.579,00	7.715.177,00
Jumlah	33.476.554,00	42.339.895,00

Saldo Bank meliputi:

	31 Desember 2004	31 Desember 2003
	(Rp)	(Rp)
- Bank Mandiri Cabang Balai Kota AC. 0091021785	4.380.083.416,00	1.935.176.620,00
- Bank Mandiri Tebing Tinggi AC. 0003171280	85.711.357,00	116.729.146,00
- Bank Mandiri Panyabungan AC. 107.0004148641	83.748.393,00	-
- PT. Bank Sumut AC. 155	76.307.228,00	156.126.542,00
- Bank Bumi Putera	-	245.400.809,00
Jumlah	4.625.850.394,00	2.453.433.117,00

2.7.1.2 Deposito Berjangka

Saldo deposito berjangka per 31 Desember 2004 dan per 31 Desember 2003 masing-masing sebesar Rp4.250.000.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 merupakan dana operasional yang didepositokan di Bank dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Deposito Bank Mandiri	3.250.000.000,00	500.000.000,00
- Deposito PT. Bank Sumut	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
Jumlah	4.250.000.000,00	2.000.000.000,00

2.7.1.3 Piutang Usaha

Saldo piutang usaha per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp925.031.616,00 dan Rp2.452.006.745,00 merupakan piutang usaha bersih setelah dikurangi cadangan penghapusan piutang dengan perincian:

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- PT. Goodyear Sumatera Plantations	494.672.334,00	781.901.715,00
- PT. Separindo Hevea Utama	-	1.127.938.645,00
- PT. Grahadura Leidong Prima	214.946.340,00	336.031.510,00
- NV. Perimex	-	78.342.800,00
- PT. KAMSA	-	123.302.450,00
- Haerudi Kesuma	-	4.489.625,00
- PT. Sago Nauli	215.412.942,00	-
Jumlah	925.031.616,00	2.452.006.745,00

2.7.1.4 Piutang Pegawai

Saldo piutang pegawai per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sejumlah Rp526.461.780,00 dan Rp247.924.600,00 merupakan piutang kepada pegawai staf dan karyawan dengan perincian:

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Kantor Direksi Medan	456.686.530,00	212.636.030,00
- Kebun Tanjung Kasau	7.632.000,00	4.287.830,00
- Kebun Sei Kari	-	4.806.740,00
- Kebun Simpang Gambir	27.420.000,00	25.664.000,00
- Kebun Patiluban	34.723.250,00	530.000,00
Jumlah	526.461.780,00	247.924.600,00

2.7.1.5 Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp48.177.500,00 dan Rp160.851.147,00 merupakan tagihan sebelum dikurangi cadangan penyisihan piutang dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004	31 Desember 2003
	(Rp)	(Rp)
- CV. Kencana Harapan	-	71.154.759,00
- Klaim Astek Tanjung Kasau	-	4.581.280,00
- Kebun Tanjung Kasau	-	25.975.000,00
- Kredit Nota Unit Kebun	13.177.500,00	43.852.108,00
- Angsuran Pakaian/Kelender Koperasi	-	15.288.000,00
- Pengembalian jaminan sewa grader	35.000.000,00	-
Jumlah	48.177.500,00	160.851.147,00

2.7.1.6 Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp71.154.759,00 merupakan penyisihan piutang dari CV Harapan Kencana yang tidak tertagih.

2.7.1.7 Piutang Pajak

Piutang pajak per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp40.707.279,00 dan Rp0,00 merupakan sisa PPN Masukan yang masih dapat dikreditkan dan lebih bayar PPh pasal 21 dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004	31 Desember 2003
	(Rp)	(Rp)
- PPN Masukan yang dapat dikreditkan	37.819.683,00	-
- Lebih bayar PPh pasal 21 - Tj. Kasau	2.887.596,00	-
Jumlah	40.707.279,00	-

2.7.1.8 PPN Masukan

PPN Masukan per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar

Rp78.308.001,00 dan Rp0,00 merupakan pajak yang dipungut atas pembelian barang.

2.7.1.9 Biaya Dibayar Dimuka

Saldo per 31 Desember tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp2.837.755,00 dan Rp36.337.050,00 merupakan biaya Asuransi mobil, bangunan dan mesin yang masa pertanggungannya berakhir pada tahun 2005, serta selisih pembayaran gaji.

2.7.1.10 Uang Muka Kas Daerah

Uang Muka Kas Daerah per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sejumlah Rp3.376.893.000,00 dan Rp2.530.000.000,00 merupakan setoran uang muka kepada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari sisa laba yang belum dibagi tahun buku 2004.

2.7.1.11 Uang Muka Kepada Pemborong

Saldo uang muka kepada pemborong per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp140.441.678,00 dan Rp121.804.293,00 merupakan pemberian uang muka atau panjar atas pengadaan barang dan jasa dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- CV. Yudistira	5.941.678,00	43.966.793,00
- CV. Purnama Indah	82.000.000,00	71.425.000,00
- Panjar Pembelian Bibit KS	52.500.000,00	-
- PT PP Lonsum	-	6.412.500,00
Jumlah	140.441.678,00	121.804.293,00

2.7.1.12 Persediaan Hasil Produksi

Saldo persediaan hasil produksi per 31 Desember 2004 sebesar Rp61.439.108,00 yang terdiri dari persediaan produksi karet sebesar Rp57.834.905,00 dan persediaan produksi kelapa sawit Rp3.604.203,00

sedangkan saldo persediaan hasil produksi per 31 Desember 2003 sebesar Rp93.506.911,00 dengan perincian sebagai berikut.

		31 Desember 2004	
		Kg	Rp
a. Komoditi Karet:			
- Rubber smoked sheet (RSS)		3.260,00	22.360.269,00
- Lumps		5.172,00	35.474.636,00
Sub Jumlah		8.432,00	57.834.905,00
b. Komoditi Kelapa Sawit:			
- Tandan Buah Segar		10.890,00	3.604.203,00
Jumlah		19.322,00	61.439.108,00

		31 Desember 2003	
		Kg	Rp
a. Komoditi Karet:			
- Rubber smoked sheet (RSS)		6.068,00	33.388.029,00
- Lumps		5.381,00	28.156.029,00
Sub Jumlah		11.449,00	61.544.058,00
b. Komoditi Kelapa Sawit:			
- Tandan Buah Segar		59.621,00	31.962.853,00
Jumlah		71.070,00	93.506.911,00

2.7.1.13 Persediaan Bahan Pelengkap

Persediaan bahan pelengkap per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp 419.182.125,00 dan Rp394.461.410,00 terdiri dari pupuk, bahan kimia, alat pertanian, bahan bakar, dll. di seluruh unit kebun dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004	31 Desember 2003
	(Rp)	(Rp)
- Kebun Tanjung Kasau	198.260.931,00	74.858.985,00
- Kebun Sei Kari	15.430.575,00	5.921.320,00
- Kebun Simpang Gambir	86.428.054,00	121.554.176,00
- Kebun Patiluban	119.062.565,00	192.126.929,00
Jumlah	419.182.125,00	394.461.410,00

2.7.1.14 Aktiva Tetap

Nilai buku aktiva tetap per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp33.345.074.930,00 dan Rp28.371.282.788,00 dengan perincian sebagai berikut.

31 Desember 2004			
Jenis Aktiva	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- Tanah	434.420.043,00	-	434.420.043,00
- TM Karet	4.322.529.141,00	1.194.856.467,00	3.127.672.674,00
- TM Kelapa Sawit	15.336.415.651,00	2.986.166.856,00	12.350.248.795,00
- TBM Karet	-	-	-
- TBM Kelapa Sawit	9.583.857.933,00	-	9.583.857.933,00
- Bangunan	6.885.432.890,00	2.066.315.037,00	4.819.117.853,00
- Jalan, Jembatan & Saluran	2.825.830.974,00	476.615.791,00	2.349.215.183,00
- Mesin dan Perlengkapan	351.514.865,00	320.293.095,00	31.221.770,00
- Alat Pengangkutan	1.462.320.872,00	1.288.952.341,00	173.368.531,00
- Alat Pertanian/Inventaris	1.343.361.136,00	867.408.988,00	475.952.148,00
Jumlah	42.545.683.505,00	9.200.608.575,00	33.345.074.930,00

31 Desember 2003			
Jenis Aktiva	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- Tanah	165.486.843,00	-	165.486.843,00
- TM Karet	4.903.934.917,00	1.850.881.803,00	3.053.053.114,00
- TM Kelapa Sawit	12.422.379.523,00	2.221.180.541,00	10.201.198.982,00
- TBM Karet	776.358.521,00	-	776.358.521,00
- TBM Kelapa Sawit	8.438.672.231,00	-	8.438.672.231,00
- Bangunan	5.721.856.740,00	1.735.092.605,00	3.986.764.135,00
- Jalan, Jembatan & Saluran	1.462.703.223,00	296.637.542,00	1.166.065.681,00
- Mesin dan Perlengkapan	354.071.541,00	312.442.511,00	41.629.030,00
- Alat Pengangkutan	1.452.500.486,00	1.310.428.733,00	142.071.753,00
- Alat Pertanian/Inventaris	1.190.643.413,00	790.660.915,00	399.982.498,00
Jumlah	36.888.607.438,00	8.517.324.650,00	28.371.282.788,00

2.7.1.15 Aktiva Tidak Berwujud

Saldo aktiva tidak berwujud per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp96.074.430,00 dan Rp19.625.555,00 merupakan nilai buku dari Hak Guna Usaha Kebun dan Hak Guna Bangunan dengan perincian sebagai berikut.

31 Desember 2004			
Jenis Aktiva	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- HGU Kebun-kebun	155.313.500,00	62.076.050,00	93.237.450,00
- HGB Kantor Direksi	4.728.300,00	1.891.320,00	2.836.980,00
Jumlah	160.041.800,00	63.967.370,00	96.074.430,00

31 Desember 2003			
Jenis Aktiva	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- HGU Kebun-kebun	52.607.300,00	33.768.473,00	18.838.827,00
- HGB Kantor Direksi	1.419.625,00	632.897,00	786.728,00
Jumlah	54.026.925,00	34.401.370,00	19.625.555,00

2.7.1.16 Aktiva Lain-lain

Saldo aktiva lain-lain per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp17.793.659.691,00 dan Rp1.922.904.281,00 terdiri dari:

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Pembibitan kelapa sawit	783.871.335,00	402.062.661,00
- Pembangunan gedung PDPSU	10.000.000,00	10.000.000,00
- Konversi tanaman kelapa sawit	359.127.811,00	1.204.456.824,00
- HGU - Gonting dalam pengurusan	291.451.705,00	291.451.705,00
- Bangunan dalam penyelesaian	16.296.213.249,00	-
- TBM Jati	14.933.091,00	14.933.091,00
- HGU - biaya pematokan tanah	38.062.500,00	-
Jumlah	17.793.659.691,00	1.922.904.281,00

Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.

- Pembibitan kelapa sawit per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp783.871.335,00 dan Rp402.062.661,00 adalah nilai bibit di kebun Tanjung Kasau, Sei Kari, Simpang Gambir dan Patiluban dengan uraian sebagai berikut.

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Tanjung Kasau	162.791.602,00	21.831.546,00
- Sei Kari	4.408.502,00	3.156.684,00
- Simpang Gambir	137.490.295,00	133.705.159,00
- Patiluban	479.180.936,00	243.369.272,00
Jumlah	783.871.335,00	402.062.661,00

- Biaya Pembangunan Gedung Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sumatera Utara (BPPDSU) sejumlah Rp10.000.000,00 adalah bagian beban PD Perkebunan untuk pembangunan gedung BPPDSU Jalan Imam Bonjol No. 11 Medan (yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara).
- Konversi kelapa sawit per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp359.127.811,00 dan Rp1.204.456.824,00 adalah nilai tanaman kelapa sawit berumur 0 tahun yang belum dikelompokkan dalam Tanaman Belum Menghasilkan karena masih dalam proses penanaman dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Tanjung Kasau	343.931.312,00	771.072.626,00
- Sei Kari	-	169.148.203,00
- Simpang Gambir	15.196.499,00	264.235.995,00
- Patiluban	-	-
Jumlah	359.127.811,00	1.204.456.824,00

- HGU dalam pengurusan sebesar Rp291.451.705,00 merupakan pengeluaran biaya dalam rangka memperoleh HGU di Gonting, Kabupaten Mandailing Natal meliputi biaya pendaftaran dan pengukuran oleh BPN, biaya pembuatan dan pemasangan patok dan lain-lain.

2.7.1.17 Kewajiban Lain-lain

Saldo Kewajiban lain-lain per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp125.610.824,00 dan Rp84.167.013,00 terdiri dari:

	31 Desember 2004	31 Desember 2003
	(Rp)	(Rp)
- Iuran Astek	44.003.924,00	39.579.633,00
- Pupuk Sp. Gambir & Patiluban	81.190.000,00	-
- PPh Staf/Peg. Karyawan	-	3.965.249,00
- Retribusi Kelapa Sawit	416.900,00	1.622.611,00
- Goodyear	-	38.999.520,00
Jumlah	125.610.824,00	84.167.013,00

2.7.1.18 Kewajiban Pajak

Kewajiban Pajak per 31 Desember 2004 dan 2003 sebesar Rp4.271.515.089,00 dan Rp4.444.446.156,00 terdiri dari:

	31 Desember 2004	31 Desember 2003
	(Rp)	(Rp)
- Pajak Pertambahan Nilai	106.506.378,00	1.070.988.452,00
- Pajak Penghasilan Psl. 25/Badan	3.778.866.895,00	2.910.422.745,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23	20.220.799,00	64.678.681,00
- Pajak Penghasilan Pasal 21	87.754.330,00	10.963.879,00
- PPN Keluaran	278.166.687,00	387.392.399,00
Jumlah	4.271.515.089,00	4.444.446.156,00

2.7.1.19 Kredit Investasi BEII Yang Jatuh Tempo

Saldo hutang kredit investasi yang akan jatuh tempo per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rp0,00 merupakan jumlah pinjaman kredit investasi dari Bank Mandiri/BEII yang akan jatuh tempo dalam tahun 2005.

2.7.1.20 Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp319.777.849,00 dan Rp537.454.713,00 merupakan penerimaan barang di kebun-kebun dari rekanan yang belum ada faktur penagihannya dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Kantor Direksi Medan	-	170.763.025,00
- Tanjung Kasau	46.142.050,00	164.920.950,00
- Sei Kari	14.514.400,00	25.258.532,00
- Simpang Gambir	92.890.700,00	87.704.227,00
- Patiluban	166.230.699,00	88.807.979,00
Jumlah	319.777.849,00	537.454.713,00

2.7.1.21 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2004 dan 2003 adalah masing-masing sebesar Rp359.971.698,00 dan Rp847.000.800,00 dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Sewa Kantor PD Perkebunan di Jl. Masjid	12.971.698,00	-
- Uang Jaminan Pembelian	347.000.000,00	847.000.800,00
Jumlah	359.971.698,00	847.000.800,00

2.7.1.22 Kredit Investasi BEII

Saldo kredit investasi per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp24.640.232.800,00 dan Rp9.900.000.000,00 merupakan saldo pinjaman kredit investasi setelah dikurangi pinjaman yang akan jatuh tempo, dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Saldo Awal	9.900.000.000,00	7.150.000.000,00
- Penambahan Kredit Tahun 2004 dan 2003	16.740.232.800,00	2.750.000.000,00
- Kredit yang Akan Jatuh Tempo Dalam Tahun 2004 dan 2003	2.000.000.000,00	-
Jumlah	24.640.232.800,00	9.900.000.000,00

Kredit investasi tersebut terdiri dari:

- a. Perjanjian Kredit Nomor 1.Hb.MBK/740/2001 tanggal 19 Juli 2001 dengan Limit Kredit Rp13.250.000,00 digunakan untuk Pembangunan

Kebun Kelapa Sawit seluas 1.040 ha dan Pemeliharaan TBM Kelapa Sawit seluas 1.100 ha.

b. Perjanjian Kredit No. I.MCO/MCCO/473/2003 tanggal 14 November 2003 yang terdiri dari:

- Kredit Investasi dengan limit kredit Rp20.215.000.000,00 digunakan untuk pembiayaan pembangunan pabrik PKS kapasitas 20 ton/jam di Desa Tanjung Kasau Kabupaten Asahan.
- KI IDC dengan limit kredit Rp 1.833.000.000,00 digunakan untuk menampung bunga KI dan bunga KI IDC selama masa-masa pembangunan (18 bulan) sebesar 65% sedangkan sisanya disetor tunai.

Sebagai jaminan kredit investasi tersebut, perusahaan menyerahkan secara fiduciari harta perusahaan berupa piutang, persediaan produksi, aktiva tetap perusahaan dan keseluruhan areal kebun yang ada.

2.7.1.23 Tunjangan Hari Tua

Saldo THT per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sejumlah Rp3.549.592.429,00 dan Rp2.195.836.674,00 dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Saldo Tahun Lalu	2.195.836.674,00	2.429.085.347,00
- Bagian Laba Tahun 2003 (10%)	740.091.439,00	-
- JU	730.438.376,00	-
Jumlah	3.666.366.489,00	2.429.085.347,00
- Pegawai	116.774.060,00	233.248.673,00
Jumlah	3.549.592.429,00	2.195.836.674,00

2.7.1.24 Modal

Modal dasar sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 yang telah disetor seluruhnya per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp 14.000.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Modal Dasar Sesuai Perda No.16 Tahun 1979	76.004,00	76.004,00
- Tambahan Modal Disetor berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara:		
- No.539/26285 tgl. 26 Des 1987	214.947.000,00	214.947.000,00
- No.539/-127 tgl. 4 Jan 1992	485.449.476,00	485.449.476,00
- No.539/6571 tgl.19 Mar 1992	430.836.890,00	430.836.890,00
- No.539/22121 tgl.19 Okt 1994	558.537.723,00	558.537.723,00
- Tambahan Modal dari Laba Tahun 1993	90.144.749,00	90.144.749,00
- Tambahan Modal th. 1994 (No.539/3320 tgl. 1 Mar 1997)	434.003.258,00	434.003.258,00
- Tambahan Modal th. 1995 (No.539/12/Perek/ 1997 tgl. 7 Jan 1997)	974.193.861,00	974.193.861,00
- Tambahan Modal dari Th. 1996 (No.525/4.704 tgl. 25 Mar 1997)	25.000.000,00	25.000.000,00
- Setoran Pemda (No.118/KB/ 1997/1998 tgl. 13 Jan 1998)	135.757.000,00	135.757.000,00
- Tambahan Modal Disetor th. 2000 (No.539/12951/Binekda/ 2000 tgl 23 Sep 2000)	4.343.871.919,00	4.343.871.919,00
- Tambahan Modal Disetor th. 2001 (No.12175 tgl. 6 Agt 2001)	307.182.120,00	307.182.120,00
- Tambahan Modal Disetor th. 2003	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
- Tambahan Modal Disetor th. 2004	4.000.000.000,00	-
Jumlah	14.000.000.000,00	10.000.000.000,00

2.7.1.25 Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Selisih penilaian kembali aktiva tetap per 31 Desember 2004 sejumlah Rp1.136.937.122,00 merupakan hasil penilaian kembali aktiva tetap yang dilaksanakan pada Desember 1979, berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979.

2.7.1.26 Cadangan Umum

Cadangan Umum per 31 Desember 2004 dan 2003 masing-masing sebesar

Rp6.887.085.956,00 dan Rp4.228.566.163,00 terdiri dari:

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
- Saldo Awal Tahun	4.228.566.163,00	1.584.391.003,00
- Penambahan		
- Pembagian Laba Th. 2003, 2002 dan 2001	2.651.662.269,00	2.507.956.001,00
- Kelebihan Pencatatan Hutang Pajak	-	87.732.135,00
- Kelebihan Pencatatan Hutang PPN dan PPh	-	38.020.911,00
- Kekurangan Pencatatan Atas Saldo Kas	-	266.097,00
- Kelebihan Pencatatan Pembayaran Piutang Usaha	5.000,00	-
- Kelebihan Pencatatan Akumulasi Penyusutan	1.057.500,00	-
- Kesalahan Pencatatan Persediaan Bahan Baku	2.418,00	14.564.120,00
- Kekurangan Pencatatan Aktiva Tak Berwujud	39.887.875,00	-
- Kelebihan Pencatatan Biaya yang Masih Harus Dibayar	231.076.725,00	-
- Kelebihan Pencatatan Penjualan	52.649.770,00	-
- Kekurangan Pencatatan Aktiva Dalam Pengerjaan	28.350.000,00	-
Sub Jumlah	7.233.257.720,00	4.232.930.267,00
- Pengurangan		
- Kelebihan Pencatatan Atas Saldo Kas	-	4.364.104,00
- Kelebihan Pencatatan Uang Muka Pada Pemborong	6.412.500,00	-
- Kelebihan Pencatatan Barang Dalam Perjalanan	161.333.260,00	-
- Kekurangan Pencatatan Hutang PPN dan PPh	37.025.766,00	-
- Kekurangan Pencatatan Pendapatan Diterima di Muka	99.999.200,00	-
- Kelebihan Pencatatan Biaya Pajak	25.935.699,00	-
- Kelebihan Pencatatan Biaya Panen dan Pengangkutan	6.015.000,00	-
- Kelebihan Pencatatan Gaji dan Tunjangan Staf	9.450.339,00	-
Sub Jumlah	346.171.764,00	4.364.104,00
Jumlah	6.887.085.956,00	4.228.566.163,00

2.7.1.27 Laba Tahun Berjalan

Saldo laba setelah dikurangi pajak penghasilan badan tahun 2004 dan 2003 adalah sebesar Rp8.472.892.074,00 dan Rp7.400.914.392,00.

2.7.2 Penjelasan atas Pos-pos Laba Rugi

2.7.2.1 Penjualan Hasil Produksi

Hasil penjualan selama tahun buku 2004 dan 2003 adalah sebesar Rp47.563.853.015,00 dan Rp43.761.718.805,00 merupakan penjualan hasil produksi kebun tahun 2004 dan tahun 2003 dengan perincian:

		31 Desember 2004	
		Kuantum (Kg)	Jumlah (Rp)
a. Komoditi Karet:			
- Rubber smoked sheet (RSS)		1.632.104,00	17.355.509.958,00
- Lumps		422.800,00	1.850.430.050,00
Sub Jumlah		2.054.904,00	19.205.940.008,00
b. Komoditi Kelapa Sawit:			
- Tandan Buah Segar		46.721.039,00	28.357.913.007,00
Jumlah		48.775.943,00	47.563.853.015,00

		31 Desember 2003	
		Kuantum (Kg)	Jumlah (Rp)
a. Komoditi Karet:			
- Rubber smoked sheet (RSS)		1.911.539,00	17.140.076.208,00
- Lumps		475.800,00	1.709.514.075,00
Sub Jumlah		2.387.339,00	18.849.590.283,00
b. Komoditi Kelapa Sawit:			
- Tandan Buah Segar		39.223.007,00	24.912.128.522,00
Jumlah		41.610.346,00	43.761.718.805,00

2.7.2.2 Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan tahun 2004 sebesar Rp29.544.403.201,00 terdiri atas beban pokok penjualan Kelapa Sawit sebesar Rp15.466.708.411,00 dan Karet sebesar Rp14.077.694.790,00 sedangkan beban pokok penjualan tahun 2003 sebesar Rp29.252.994.006,00 terdiri atas beban pokok penjualan kelapa sawit sebesar Rp16.196.904.673,00 dan karet sebesar Rp13.056.089.333,00 dengan uraian sebagai berikut.

31 Desember 2004

	Kelapa Sawit (Rp)	Karet (Rp)	Jumlah (Rp)
Persediaan Awal	31.962.853,00	61.544.058,00	93.506.911,00
Beban Produksi			
- Beban Tanaman	9.941.921.306,00	9.694.019.409,00	19.635.940.715,00
- Beban Pengolahan	-	508.697.792,00	508.697.792,00
- Beban Umum	4.341.323.636,00	3.375.597.553,00	7.716.921.189,00
- Beban Penyusutan	1.155.104.819,00	495.670.883,00	1.650.775.702,00
Jumlah Beban Produksi	15.438.349.761,00	14.073.985.637,00	29.512.335.398,00
Persediaan Akhir	3.604.203,00	57.834.905,00	61.439.108,00
Beban Pokok Penjualan	15.466.708.411,00	14.077.694.790,00	29.544.403.201,00

31 Desember 2003

	Kelapa Sawit (Rp)	Karet (Rp)	Jumlah (Rp)
Persediaan Awal	-	140.485.436,00	140.485.436,00
Beban Produksi			
- Beban Tanaman	11.365.438.276,00	8.993.173.153,00	20.358.611.429,00
- Beban Pengolahan	-	395.030.701,00	395.030.701,00
- Beban Umum	3.962.687.472,00	3.097.728.429,00	7.060.415.901,00
- Beban Penyusutan	900.741.778,00	491.215.672,00	1.391.957.450,00
Jumlah Beban Produksi	16.228.867.526,00	12.977.147.955,00	29.206.015.481,00
Persediaan Akhir	31.962.853,00	61.544.058,00	93.506.911,00
Beban Pokok Penjualan	16.196.904.673,00	13.056.089.333,00	29.252.994.006,00

Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut.

31 Desember 2004

	Kelapa Sawit (Rp)	Karet (Rp)	Jumlah (Rp)
Beban Tanaman :			
- Gaji & Tunjangan Pegawai Staf	398.959.194,00	156.913.099,00	555.872.293,00
- Beban Pemeliharaan TM	4.296.619.013,00	1.321.935.598,00	5.618.554.611,00
- Beban Panen dan Pengangkutan	5.246.343.099,00	8.215.170.712,00	13.461.513.811,00
Jumlah Beban Tanaman	9.941.921.306,00	9.694.019.409,00	19.635.940.715,00
Beban Pengolahan :			
- Beban Pengolahan	-	504.728.185,00	504.728.185,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan	-	2.380.927,00	2.380.927,00
- Beban Pengepakan	-	-	-
- Beban Asuransi Pabrik	-	1.588.680,00	1.588.680,00
Jumlah Beban Pengolahan	-	508.697.792,00	508.697.792,00
Beban Umum :			
- Gaji & Tunjangan Pegawai Staf	261.777.090,00	284.971.722,00	546.748.812,00
- Gaji & Tunjangan Non Staf	386.668.393,00	711.434.340,00	1.098.102.733,00
- Honorarium	39.555.000,00	5.870.000,00	45.425.000,00
- Pengangkutan & Perjalanan Dinas	659.310.160,00	273.092.093,00	932.402.253,00
- Pemeliharaan Bangunan	74.817.951,00	321.317.283,00	396.135.234,00
- Pemeliharaan Alat Pertanian dan Inventaris	34.875.500,00	26.891.500,00	61.767.000,00
- Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Saluran	1.600.000,00	5.973.750,00	7.573.750,00
- Iuran BKS/PPS, Beban Rekomendasi Pemupukan dll.	175.832.996,00	70.126.575,00	245.959.571,00
- Keamanan	771.796.807,00	1.037.989.218,00	1.809.786.025,00
- Penerangan dan Air	84.884.147,00	66.339.217,00	151.223.364,00
- Telepon, Telegram & ATK	77.135.674,00	209.040.520,00	286.176.194,00
- Konsultasi dan Inspeksi	5.833.331,00	6.233.338,00	12.066.669,00
- Asuransi Bangunan	49.748.973,00	11.490.606,00	61.239.579,00
- Bunga Kredit Investasi	1.413.600.000,00	-	1.413.600.000,00
- Pajak Bumi dan Bangunan/Sewa Tanah	303.887.614,00	344.827.391,00	648.715.005,00
Jumlah Beban Umum	4.341.323.636,00	3.375.597.553,00	7.716.921.189,00
Beban Penyusutan :			
- Tanaman Menghasilkan	764.986.315,00	224.478.142,00	989.464.457,00
- Bangunan	166.136.688,00	154.437.928,00	320.574.616,00
- Mesin dan Peralatan	5.128.124,00	5.279.126,00	10.407.250,00
- Alat Pengangkutan	54.143.380,00	11.858.106,00	66.001.486,00
- Inventaris	69.266.953,00	46.820.775,00	116.087.728,00
- Jalan, Jembatan & Saluran	95.443.359,00	52.796.806,00	148.240.165,00
Jumlah Penyusutan	1.155.104.819,00	495.670.883,00	1.650.775.702,00
Jumlah Beban Produksi	15.438.349.761,00	14.073.985.637,00	29.512.335.398,00

31 DESEMBER 2003

	Kelapa Sawit (Rp)	Karet (Rp)	Jumlah (Rp)
Beban Tanaman :			
- Gaji & Tunjangan Pegawai Staf	334.601.695,00	132.218.317,00	466.820.012,00
- Beban Pemeliharaan TM	4.307.766.093,00	1.129.906.338,00	5.437.672.431,00
- Beban Panen dan Pengangkutan	6.723.070.488,00	7.731.048.498,00	14.454.118.986,00
Jumlah Beban Tanaman	11.365.438.276,00	8.993.173.153,00	20.358.611.429,00
Beban Pengolahan :			
- Beban Pengolahan	-	390.388.091,00	390.388.091,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan	-	3.068.559,00	3.068.559,00
- Beban Pengepakan	-	-	-
- Beban Asuransi Pabrik	-	1.574.051,00	1.574.051,00
Jumlah Beban Pengolahan	-	395.030.701,00	395.030.701,00
Beban Umum :			
- Gaji & Tunjangan Pegawai Staf	205.873.885,00	185.516.991,00	391.390.876,00
- Gaji & Tunjangan Non Staf	289.955.380,00	597.720.765,00	887.676.145,00
- Honorarium	27.075.000,00	-	27.075.000,00
- Pengangkutan & Perjalanan Dinas	650.817.203,00	291.739.790,00	942.556.993,00
- Pemeliharaan Bangunan	74.918.116,00	422.500.784,00	497.418.900,00
- Pemeliharaan Alat Pertanian dan Inventaris	8.449.310,00	19.100.500,00	27.549.810,00
- Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Saluran	-	-	-
- Iuran BKS/PPS, Beban Rekomendasi Pupukan dll.	128.719.565,00	224.394.279,00	353.113.844,00
- Keamanan	605.643.423,00	830.212.386,00	1.435.855.809,00
- Penerangan dan Air	136.839.915,00	54.078.621,00	190.918.536,00
- Telepon, Telegram & ATK	100.797.463,00	180.881.238,00	281.678.701,00
- Konsultasi dan Inspeksi	8.333.330,00	7.500.006,00	15.833.336,00
- Asuransi Bangunan	25.021.893,00	9.084.089,00	34.105.982,00
- Bunga Kredit Investasi	1.445.361.478,00	-	1.445.361.478,00
- Pajak Bumi dan Bangunan/Sewa	254.881.511,00	274.998.980,00	529.880.491,00
Jumlah Beban Umum	3.962.687.472,00	3.097.728.429,00	7.060.415.901,00
Beban Penyusutan :			
- Tanaman Menghasilkan	621.118.978,00	243.352.900,00	864.471.878,00
- Bangunan	139.502.474,00	147.146.570,00	286.649.044,00
- Mesin dan Peralatan	6.837.500,00	7.038.833,00	13.876.333,00
- Alat Pengangkutan	45.909.814,00	11.298.402,00	57.208.216,00
- Inventaris	54.577.427,00	42.127.140,00	96.704.567,00
- Jalan, Jembatan & Saluran	32.795.585,00	40.251.827,00	73.047.412,00
Jumlah Penyusutan	900.741.778,00	491.215.672,00	1.391.957.450,00
Jumlah Beban Produksi	16.228.867.526,00	12.977.147.955,00	29.206.015.481,00

2.7.2.3 Beban Administrasi Umum

Beban Administrasi Umum tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp4.870.535.148,00 dan Rp3.998.787.473,00 adalah beban administrasi dan beban umum Kantor Direksi Medan dengan perincian sebagai berikut.

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
Gaji & Tunj. Peg. Staf dan Non Staf	2.190.344.125,00	1.623.717.240,00
Biaya Badan Pengawas	767.185.090,00	385.360.012,00
Honorarium	54.462.500,00	23.312.500,00
Pensiun/Pesangon Pegawai	809.162.388,00	562.267.656,00
Pengangkutan dan Perjalanan Dinas	203.746.942,00	141.329.134,00
Pemeliharaan Bangunan	31.834.055,00	10.269.050,00
Pemeliharaan Inventaris	14.444.459,00	21.623.769,00
Penyusutan Kantor Direksi	79.994.889,00	66.149.623,00
Amortisasi HGU/HGB	29.744.018,00	2.701.346,00
Keamanan	8.575.000,00	16.109.800,00
Penerangan dan Air	49.193.830,00	40.805.375,00
Telepon, Telegram & ATK	168.365.295,00	190.978.274,00
Asuransi Bangunan Kantor Direksi	2.394.000,00	2.394.000,00
Pajak dan Sewa Tanah	1.511.056,00	1.214.056,00
Iuran dan Sumbangan	192.692.500,00	209.480.335,00
Biaya Pengembangan PDPSU	266.885.001,00	701.075.303,00
Jumlah	4.870.535.148,00	3.998.787.473,00

2.7.2.4 Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain tahun 2004 dan 2003 sebesar Rp270.695.342,00 dan Rp1.090.218.936,00 terdiri dari:

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
Bunga Deposito dan Jasa Giro	238.389.304,00	176.206.642,00
Hasil Penjualan Kayu Karet	-	905.245.728,00
Sewa Bangunan	12.971.698,00	8.490.566,00
Lain-lain	19.334.340,00	276.000,00
Jumlah	270.695.342,00	1.090.218.936,00

2.7.2.5 Beban Lain-lain

Beban lain-lain tahun 2004 dan 2003 sebesar Rp774.097.954,00 dan Rp946.595.770,00 terdiri dari:

	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
Representatif & Entertainment	499.850.000,00	324.675.000,00
Uang Wajib Tahunan	2.746.400,00	2.746.400,00
Kerugian Penghapusan TM Karet	246.066.039,00	269.840.067,00
Pajak	-	325.281.722,00
Kerugian Bahan Baku Pelengkap	-	18.025.111,00
Penghapusan TM Rotan	-	6.027.470,00
Penghapusan Piutang	4.581.280,00	-
Penghapusan Aktiva	20.854.235,00	-
Jumlah	774.097.954,00	946.595.770,00

Beban penghapusan tanaman menghasilkan (Aktiva Tetap) sebesar Rp246.066.039,00 merupakan penghapusan atas nilai buku tanaman karet di Kebun Tanjung Kasau dan Sei Kari yang telah dikonversi dalam tahun 2004 dan dijual dengan perincian:

	31 Desember 2004		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- Kebun Tj. Kasau	1.357.272.481,00	795.292.811,00	561.979.670,00
- Kebun Sei Kari	167.033.651,00	85.210.668,00	81.822.983,00
Jumlah	1.524.306.132,00	880.503.479,00	643.802.653,00
Nilai jual			397.736.614,00
Kerugian			246.066.039,00

	31 Desember 2003		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
- Kebun Tj. Kasau	244.918.750,00	125.628.238,00	119.290.512,00
- Kebun Sei Kari	332.525.236,00	181.975.681,00	150.549.555,00
Jumlah	577.443.986,00	307.603.919,00	269.840.067,00

2.7.2.6 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar

Rp4.172.619.980,00 dan Rp3.252.646.100,00 merupakan pajak penghasilan atas laba sebelum pajak tahun berjalan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
N E R A C A
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2004

NAMA REKENING	Catatan	Per 31 Desember 2004	Per 31 Desember 2003		NAMA REKENING	Catatan
Aktiva Lancar					Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Bank	2.7.1.1	4,659,326,948.00	2,495,773,012.00	2,163,553,936.00	Kewajiban lain-lain	2.7.1.17
Deposito berjangka	2.7.1.2	4,250,000,000.00	2,000,000,000.00	2,250,000,000.00	Kewajiban Pajak	2.7.1.18
Piutang usaha	2.7.1.3	925,031,616.00	2,452,006,745.00	(1,526,975,129.00)	Hutang KI Yang Akan Jatuh Tempo	2.7.1.19
Piutang Pegawai	2.7.1.4	526,461,780.00	247,924,600.00	278,537,180.00	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2.7.1.20
Piutang lain-lain	2.7.1.5	48,177,500.00	160,851,147.00	(112,673,647.00)	Pendapatan diterima dimuka	2.7.1.21
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	2.7.1.6	-	(71,154,759.00)	71,154,759.00	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	
Piutang Pajak	2.7.1.7	40,707,279.00	-	40,707,279.00		
PPN Masukan	2.7.1.8	78,308,001.00	-	78,308,001.00	Kewajiban Jangka Panjang	
Biaya dibayar dimuka	2.7.1.9	2,837,755.00	36,337,050.00	(33,499,295.00)	Tunjangan Hari Tua	
Uang Muka Kas Daerah	2.7.1.10	3,376,893,000.00	2,530,000,000.00	846,893,000.00	Kredit Investasi BEII	2.7.1.22
Uang Muka Pada Pemborong	2.7.1.11	140,441,678.00	121,804,293.00	18,637,385.00	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	
Persediaan Hasil Produksi	2.7.1.12	61,439,108.00	93,506,911.00	(32,067,803.00)		
Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap	2.7.1.13	419,182,125.00	394,461,410.00	24,720,715.00		
Jumlah Aktiva Lancar		14,528,806,790.00	10,461,510,409.00	4,067,296,381.00	Kewajiban Lain-lain	
Aktiva Tetap	2.7.1.14			-	Tunjangan Hari Tua	2.7.1.23
Harga Perolehan		42,545,683,505.00	36,888,607,438.00	5,657,076,067.00	Jumlah Kewajiban Lain-lain	
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap		(9,200,608,575.00)	(8,517,324,650.00)	(683,283,925.00)		
Nilai Buku Aktiva Tetap		33,345,074,930.00	28,371,282,788.00	4,973,792,142.00		
Aktiva Tidak Berwujud	2.7.1.15			-	Ekuitas	
Harga Perolehan		160,041,800.00	54,026,925.00	106,014,875.00	Modal dasar	2.7.1.24
Akumulasi Amortisasi		(63,967,370.00)	(34,401,370.00)	(29,566,000.00)	Modal Disetor	
Nilai Buku Aktiva Tidak Berwujud		96,074,430.00	19,625,555.00	76,448,875.00	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	2.7.1.25
Aktiva Lain-lain	2.7.1.16	17,793,659,691.00	1,922,904,281.00	15,870,755,410.00	Cadangan Umum	2.7.1.26
				-	Laba Tahun Berjalan	2.7.1.27
				-		
				-		
JUMLAH AKTIVA		65,763,615,841.00	40,775,323,033.00	24,988,292,808.00	JUMLAH PASIVA	
				-		

PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
N E R A C A
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

NAMA REKENING	Catatan	Per 31 Desember 2004 (Rp)	Per 31 Desember 2003 (Rp)	NAMA REKENING	Catatan	Per 31 Desember 2004 (Rp)
Aktiva Lancar				Kewajiban Jangka Pendek		
Kas dan Bank	2.7.1.1	4,659,326,948.00	2,495,773,012.00	Kewajiban lain-lain	2.7.1.17	125,610,824.00
Deposito berjangka	2.7.1.2	4,250,000,000.00	2,000,000,000.00	Kewajiban Pajak	2.7.1.18	4,271,515,089.00
Piutang usaha	2.7.1.3	925,031,616.00	2,452,006,745.00	Hutang KI Yang Akan Jatuh Tempo	2.7.1.19	2,000,000,000.00
Piutang Pegawai	2.7.1.4	526,461,780.00	247,924,600.00	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2.7.1.20	319,777,849.00
Piutang lain-lain	2.7.1.5	48,177,500.00	160,851,147.00	Pendapatan diterima dimuka	2.7.1.21	359,971,698.00
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	2.7.1.6	-	(71,154,759.00)	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7,076,875,460.00
Piutang Pajak	2.7.1.7	40,707,279.00	-	Kewajiban Jangka Panjang		
PPN Masukan	2.7.1.8	78,308,001.00	-	Tunjangan Hari Tua		-
Biaya dibayar dimuka	2.7.1.9	2,837,755.00	36,337,050.00	Kredit Investasi BEII	2.7.1.22	24,640,232,800.00
Uang Muka Kas Daerah	2.7.1.10	3,376,893,000.00	2,530,000,000.00	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		24,640,232,800.00
Uang Muka Pada Pemborong	2.7.1.11	140,441,678.00	121,804,293.00	Kewajiban Lain-lain		
Persediaan Hasil Produksi	2.7.1.12	61,439,108.00	93,506,911.00	Tunjangan Hari Tua	2.7.1.23	3,549,592,429.00
Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap	2.7.1.13	419,182,125.00	394,461,410.00	Jumlah Kewajiban Lain-lain		3,549,592,429.00
Jumlah Aktiva Lancar		14,528,806,790.00	10,461,510,409.00	Ekuitas		
Aktiva Tetap	2.7.1.14			Modal dasar	2.7.1.24	14,000,000,000.00
Harga Perolehan		42,545,683,505.00	36,888,607,438.00	Modal Disetor		14,000,000,000.00
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap		(9,200,608,575.00)	(8,517,324,650.00)	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	2.7.1.25	1,136,937,122.00
Nilai Buku Aktiva Tetap		33,345,074,930.00	28,371,282,788.00	Cadangan Umum	2.7.1.26	6,887,085,956.00
Aktiva Tidak Berwujud	2.7.1.15			Laba Tahun Berjalan	2.7.1.27	8,472,892,074.00
Harga Perolehan		160,041,800.00	54,026,925.00			30,496,915,152.00
Akumulasi Amortisasi		(63,967,370.00)	(34,401,370.00)			
Nilai Buku Aktiva Tidak Berwujud		96,074,430.00	19,625,555.00			
Aktiva Lain-lain	2.7.1.16	17,793,659,691.00	1,922,904,281.00			
JUMLAH AKTIVA		65,763,615,841.00	40,775,323,033.00	JUMLAH PASIVA		65,763,615,841.00

2.2 Laporan Laba Rugi

**PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2004**

Uraian	CATATAN	31 Desember 2004 (Rp)	31 Desember 2003 (Rp)
Penjualan Hasil Produksi	2.7.2.1	47,563,853,015.00	43,761,718,805.00
Beban Pokok Penjualan	2.7.2.2	29,544,403,201.00	29,252,994,006.00
Jumlah Pendapatan Kotor		18,019,449,814.00	14,508,724,799.00
Beban Usaha			
- Beban Administrasi dan Umum	2.7.2.3	(4,870,535,148.00)	(3,998,787,473.00)
Pendapatan Bersih Operasi		13,148,914,666.00	10,509,937,326.00
Pendapatan dan Beban Lain-lain			
- Pendapatan Lain-lain	2.7.2.4	270,695,342.00	1,090,218,936.00
- Beban Lain-lain	2.7.2.5	(774,097,954.00)	(946,595,770.00)
		(503,402,612.00)	143,623,166.00
LABA (Sebelum Pajak)		12,645,512,054.00	10,653,560,492.00
Pajak Penghasilan Badan	2.7.2.6	4,172,619,980.00	3,252,646,100.00
LABA BERSIH		8,472,892,074.00	7,400,914,392.00

2.3 Laporan Perubahan Ekuitas

PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

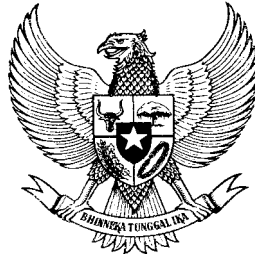
Uraian	Modal Saham			Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap (Rp)	Cadangan Setoran Modal (Rp)	Cadangan Umum (Rp)	Saldo Laba yang Belum Dibagi (Rp)	Jumlah (Rp)
	Modal Dasar (Rp)	Modal Belum Disetor (Rp)	Modal Disetor (Rp)					
Saldo 1 Januari 2003	8,000,000,000	-	8,000,000,000	1,136,937,122	-	1,584,391,003	4,971,897,031	15,693,225,156
Koreksi pajak tahun sebelumnya	-	-	-	-	-	136,219,159	-	136,219,159
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	7,400,914,392	7,400,914,392
Pembagian laba tahun 2002:	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bagian Pemda Tk.I	-	-	-	-	-	534,543,367	(2,733,808,470)	(2,199,265,103)
- Tunjangan Hari Tua	-	-	-	-	-	730,438,376	(497,189,703)	233,248,673
- Cadangan Umum	-	-	-	-	-	1,242,974,258	(1,242,974,258)	-
- Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	(497,924,600)	(497,924,600)
Setoran Tambahan Modal	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan cadangan untuk tambahan setoran modal dari sisa bagian laba Pemda Tk.I	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2003	10,000,000,000	-	10,000,000,000	1,136,937,122	-	4,228,566,163	7,400,914,392	22,766,417,677
Saldo 1 Januari 2004	10,000,000,000	-	10,000,000,000	1,136,937,122	-	4,228,566,163	7,400,914,392	22,766,417,677
Koreksi pajak tahun sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	8,472,892,074	8,472,892,074
Pembagian laba tahun 2003:	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bagian Pemda Tk.I	-	-	-	-	-	1,005,959,549	(4,070,502,916)	(3,064,543,367)
- Tunjangan Hari Tua	-	-	-	-	-	(730,438,376)	(740,091,439)	(1,470,529,815)
- Cadangan Umum	-	-	-	-	-	2,382,998,620	(1,850,228,598)	532,770,022
- Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	(740,091,439)	(740,091,439)
Setoran Tambahan Modal	4,000,000,000	-	4,000,000,000	-	-	-	-	4,000,000,000
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan cadangan untuk tambahan setoran modal dari sisa bagian laba Pemda Tk.I	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2004	14,000,000,000	-	14,000,000,000	1,136,937,122	-	6,887,085,956	8,472,892,074	30,496,915,152

2.4 Laporan Arus Kas

PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

U r a i a n	2004 (Rp)	2003 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba bersih sebelum pajak	12,645,512,054.00	10,653,560,492.00
Penyesuaian untuk :		
- Beban penyusutan Aktiva Tetap	683,283,925.00	1,482,388,860.00
- Beban Amortisasi HGU/HGB	29,566,000.00	2,701,346.00
- Kerugian Penjualan Aktiva Tetap	246,066,039.00	(327,801,742.00)
- Penyisihan Piutang ragu-ragu	-	-
Laba Operasi sebelum perubahan Modal Kerja	13,604,428,018.00	11,810,848,956.00
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Lancar		
- Piutang Usaha	(1,526,975,129.00)	1,682,049,632.00
- Deposito Berjangka	2,250,000,000.00	700,000,000.00
- Piutang Pegawai	278,537,180.00	(115,998,100.00)
- Piutang lain-lain	(41,518,888.00)	71,491,525.00
- Uang Muka Kerja	-	-
- Biaya Dibayar Dimuka	(33,499,295.00)	(320,298.00)
- Uang Muka Kas Daerah	846,893,000.00	330,000,000.00
- Uang Muka kepada Pendorong	18,637,385.00	56,329.00
- Piutang Pajak PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai	119,015,280.00	(4,915,013.00)
- Persediaan Hasil Produksi	(32,067,803.00)	(37,408,445.00)
- Persediaan bahan pelengkap	24,720,715.00	108,611,823.00
Jumlah kenaikan (penurunan) aktiva lancar	1,903,742,445.00	2,733,567,453.00
Kenaikan (Penurunan) Hutang/Kewajiban Jangka Pendek :		
- Hutang lain-lain	41,443,811.00	37,526,828.00
- Biaya belum dibayar	(217,676,864.00)	281,004,771.00
- Hutang Pajak	(172,931,067.00)	(1,376,089,557.00)
- Hutang KI/BEII jatuh tempo	2,000,000,000.00	(894,380,133.00)

- Pendapatan Diterima Dimuka	(487,029,102.00)	518,004,771.00
Jumlah kenaikan (penurunan) kerugian jangka pendek	1,163,806,778.00	(1,433,933,320.00)
Kas Dihasilkan dari Aktivitas Operasi	12,864,492,351.00	7,643,348,183.00
- Pembayaran Pajak	(4,172,619,980.00)	(3,252,646,100.00)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	8,691,872,371.00	4,390,702,083.00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
- Penambahan / pembelian Aktiva	(5,657,076,067.00)	(1,279,870,262.00)
- Pengurangan aktiva	(643,802,653.00)	(3,822,349,978.00)
- Perpanjangan HGU/HGB	(106,014,875.00)	-
- Penjualan Pohon Karet Tua/Rotan	397,736,614.00	905,245,728.00
- Penambahan Aktiva Lain-lain	(15,870,755,410.00)	(478,849,421.00)
Arus Kas digunakan untuk aktivitas investasi	(21,879,912,391.00)	(4,675,823,933.00)
Arus Kas dari Aktivitas pendanaan		
- Kenaikan (Penurunan) Kredit Investasi	14,740,232,800.00	2,750,000,000.00
- Pembagian Laba tahun 2003	(7,400,914,392.00)	(4,971,897,673.00)
- Kenaikan Tunjangan Hari Tua	1,353,755,755.00	(233,032,515.00)
- Kenaikan Modal Dasar	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00
- Kenaikan Cadangan Umum	2,658,519,793.00	2,644,175,160.00
- Kenaikan (Penurunan) Cadangan Setoran modal	-	-
Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	15,351,593,956.00	2,189,244,972.00
Kenaikan/penurunan bersih kas/bank	2,163,553,936.00	1,904,123,122.00
Saldo kas/bank awal periode	2,495,773,012.00	591,649,890.00
Kas dan Bank pada akhir periode	4,659,326,948.00	2,495,773,012.00



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

ATAS

**KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PENGENDALIAN INTERN
TAHUN BUKU 2004**

PADA

**PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DI

MEDAN

**PERWAKILAN I BPK-RI
DI MEDAN**

Nomor : /S/XIV.1/ /2005

Tanggal :

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN	1
LAMPIRAN	
1. Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Tahun Buku 2004 Senilai Rp2.443.967.750,00 Tidak Sesuai Ketentuan	3
2. Pekerjaan Swakelola untuk Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan dan Tanaman Belum Menghasilkan Kelapa Sawit dan Pembuatan Sarana Karyawan pada Unit Kebun Patiluban dan Simpang Gambir Belum Sesuai Ketentuan	9
3. Aplikasi Pemupukan Tahun 2004 Menggunakan Rekomendasi Pemupukan Tahun 2003	13
4. Pemberian Pinjaman Kepada Karyawan Perkebunan Tahun Buku 2004 Belum Memberikan Kontribusi bagi Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (PDPPSU)	16
5. Penggunaan Sisa Bibit Kelapa Sawit Tahun Pembibitan 2002 dan 2003 Belum Efektif dan Efisien	19
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN	22
LAMPIRAN	
1. Terdapat Kelemahan pada Sistem Pembukuan dan Sistem Pengendalian Intern yang Dapat Mempengaruhi Pengambilan Keputusan pada Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (PDPPSU)	24
a. Metode Penilaian Persediaan Tidak Konsisten	24
b. Perlakuan Terhadap Bibit Mati dan Afkir Tidak Seragam	24
c. Pencatatan dan Pelaksanaan Kewajiban Pajak Belum Tertib	25

d. Pengalokasian Biaya Operasional pada Perhitungan Harga Pokok Produksi Kelapa Sawit dan Karet Unit Kebun Tanjung Kasau dan Kebun Sei Kari Belum Tepat	27
2. Kelemahan-kelemahan Lain dalam Sistem Pengendalian Intern yang Perlu Diungkapkan	32

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Imam Bonjol No. 22 Telp. (061) 4519039 Fax. (061) 4538140 Medan 20152

Kepada Yth.

- 1. Badan Pengawas PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara**
- 2. Direksi PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara**

di

Medan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Neraca PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2004, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 3 Juni 2005.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kami melakukan pengujian terhadap kepatuhan PD Perkebunan Sumatera Utara terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa berkaitan dengan unsur yang kami uji, PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Berdasarkan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satupun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa PD Perkebunan

Provinsi Sumatera Utara tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Namun kami mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan kepatuhan PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada lampiran.

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Badan Pengawas, Direksi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik distribusinya tidak dibatasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Joseph Sinaga, SE.Ak
Register Negara No. D-12142

Medan, 3 Juni 2005

1. Pelaksanaan Pengadaan Pupuk Tahun Buku 2004 Senilai Rp2.443.967.750,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 1985 tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (PDPPSU) adalah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka perusahaan dalam tahun buku 2004 mengadakan perjanjian kerjasama yang dibuat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan pupuk kebutuhan unit-unit kebun dalam rangka pemeliharaan tanaman kelapa sawit dan karet.

Tahun 2004 PDPPSU melaksanakan pekerjaan pengadaan pupuk Kiesrite, Urea, KCI/MOP, CIRP, E. Kiesrite, NPK serta pupuk Dolomite untuk kebutuhan rutin unit kebun Tanjung Kasau, Sei Kari, Simpang Gambir dan Patiluban.

Dari pemeriksaan secara uji petik terhadap 21 item kontrak yang diterbitkan oleh PDPPSU diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Terdapat 11 item kontrak senilai Rp2.443.967.750,00 dilakukan dengan penunjukan langsung dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	No & Tgl SPK	Pelaksana	Nilai (Rp)
1	Pengadaan pupuk Urea, KCI/MOP	40/DIR/SPK/PDP/2004 29 Januari 2004	PT.Pertani Wilayah Sumut	136.690.000,00
2	Pengadaan pupuk Kiesrite	106/DIR/SPK/PDP/2004 20 Februari 2004	PT.Mega Eltra	60.260.000,00
3	Pengadaan pupuk Urea, KCI/MOP	107/DIR/SPK/PDP/2004 20 Februari 2004	PT.Pertani Wilayah Sumut	266.668.000,00
4	Pengadaan pupuk Urea, KCI/MOP	336/DIR/SPK/PDP/2004 5 Mei 2004	PT.Pertani Wilayah Sumut	352.624.500,00
5	Pengadaan pupuk Urea, KCI/MOP	427/DIR/SPK/PDP/2004 8 Juni 2004	PT.Pertani Wilayah Sumut	251.907.000,00
6	Pengadaan pupuk Kiesrite	515/DIR/SPK/PDP/2004 7 Juli 2004	PT.Mega Eltra	202.254.000,00

No	Uraian	No & Tgl SPK	Pelaksana	Nilai (Rp)
7	Pengadaan pupuk Urea	549/DIR/SPK/PDP/2004 21 Juli 2004	PT.Pertani Wilayah Sumut	116.298.000,00
8	Pengadaan pupuk Urea, KCI/MOP	689/DIR/SPK/PDP/2004 31 Agustus 2004	PT.Pertani Wilayah Sumut	270.625.000,00
9	Pengadaan pupuk Urea, KCI/MOP, Borate	742/DIR/SPK/PDP/2004 24 September 2004	PT.Pertani Wilayah Sumut	434.596.250,00
10	Pengadaan pupuk Urea, KCI/MOP	894/DIR/SPK/PDP/2004 5 Nopember 2004	PT.Pertani Wilayah Sumut	104.150.000,00
11	Pengadaan pupuk Urea, KCI/MOP	1014/DIR/SPK/PDP/2004 15 Desember 2004	PT.Mega Eltra	247.895.000,00
J u m l a h				2.443.967.750,00

Pekerjaan pengadaan pupuk tersebut seharusnya tidak dilakukan dengan penunjukan langsung karena bukan pekerjaan penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, dan juga bukan pekerjaan yang bersifat rahasia atau pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 serta pekerjaan spesifik yang hanya dapat dikerjakan oleh perusahaan tertentu.

Menurut keterangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada PDPPSU, penunjukan langsung dilakukan karena kelangkaan pupuk dan banyaknya beredar pupuk palsu serta menghindarkan PDPPSU dari penggunaan pupuk bersubsidi. Jika dilakukan dengan proses lelang, belum tentu pemenang lelang dapat menyediakan pesanan pupuk sesuai dengan kebutuhan PDPPSU, hanya distributor besar yang menyanggupi dan menjamin ketersediaan pupuk tersebut.

- b. Terdapat 10 item kontrak senilai Rp1.160.873.025,00 mengalami keterlambatan pelaksanaan antara 1 s.d. 42 hari sehingga tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut.

No.	No. SPK	Tanggal	Nilai (Rp)	Penyerahan		Terlambat (hari)
				Seharusnya	Realisasi	
1	40/Dir/SPK/PDP/2004	29/01/2004	136.690.000,00	16/02/2004	21/02/2004	05
2	118/Dir/SPK/PDP/2004	25/02/2004	82.626.225,00	20/03/2004	03/04/2004	14
3	426/Dir/SPK/PDP/2004	08/06/2004	201.465.000,00	30/06/2004	04/08/2004	35
4	427/Dir/SPK/PDP/2004	08/06/2004	251.907.000,00	30/06/2004	01/07/2004	01
5	550/Dir/SPK/PDP/2004	21/07/2004	17.710.000,00	14/08/2004	06/09/2004	23
6	585/Dir/SPK/PDP/2004	30/07/2004	150.480.000,00	06/09/2004	18/10/2004	42
7	688/Dir/SPK/PDP/2004	31/08/2004	9.756.600,00	18/09/2004	25/09/2004	7
8	689/Dir/SPK/PDP/2004	31/08/2004	270.625.000,00	22/09/2004	24/09/2004	02
9	896/Dir/SPK/PDP/2004	05/11/2004	7.258.800,00	30/11/2004	09/12/2004	09
10	902/Dir/SPK/PDP/2004	08/11/2004	32.354.400,00	15/12/2004	26/01/2005	42
J u m l a h			1.160.873.025,00			

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan keterangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa PDPPSU yang menyebutkan bahwa penunjukan langsung dilakukan dengan salah satu alasan adalah menjamin ketersediaan pupuk sesuai kebutuhan.

Selain itu, dari pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak pengadaan serta Berita Acara Penyerahan Barang antara Rekanan dan Pihak PDPPSU diketahui bahwa pihak PDPPSU tidak dapat memberikan sanksi kepada pihak rekanan atas keterlambatan pengadaan pupuk-pupuk tersebut, karena didalam kontrak tidak diatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada rekanan jika rekanan terkait cidera janji (wan prestasi).

Kondisi itu tidak sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yaitu:

- a. Pasal 3 Point C yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
- b. Lampiran I Bab 1 Point C.1.a.4) yang menyatakan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - 1) Keadaan tertentu, yaitu:

- a) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam.
 - b) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden.
 - c) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 dengan ketentuan:
 - (1) Untuk keperluan sendiri.
 - (2) Teknologi sederhana.
 - (3) Resiko kecil.
 - (4) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- 2) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:
- a) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah.
 - b) Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten.
 - c) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil.
 - d) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.
- c. Bab II yang menyatakan bahwa isi dalam kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
- 1) Pada pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan dan alamat.
 - 2) Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang yang terikat dalam perjanjian.
 - 3) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian.
 - 4) Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat syarat pembayaran.
 - 5) Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan rinci yakni:

- a) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya.
- b) Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan atau ketentuan mengenai kelalaian.
- c) Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- d) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak.
- e) Ketentuan mengenai keadaan memaksa.
- f) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- g) Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.
- h) Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan perlindungan.

Penyimpangan itu mengakibatkan:

- a. Harga barang pengadaan pupuk sebesar Rp2.443.967.750,00 bukan merupakan harga yang paling menguntungkan PDPPSU.
- b. Menghilangkan kesempatan bagi rekanan lain untuk ikut serta dalam penawaran.
- c. Mengganggu program aplikasi pemupukan tahun 2004 yang pada akhirnya akan mengganggu kualitas dan kuantitas produksi.

Penyimpangan itu terjadi karena:

- a. Panitia Pengadaan lalai tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam mengevaluasi pengadaan.
- b. Pihak PDPPSU dalam hal ini Direktur dalam menyetujui/menandatangani surat perjanjian kerja belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku.
- c. Direktur PDPPSU kurang melakukan pengendalian dan pengawasan.

Direksi PDPPSU menyatakan bahwa pengadaan pupuk tahun buku 2004 dilakukan dengan menunjuk pemasok yang merupakan distributor utama, antara lain PT Pertani dan PT Mega Eltra. Hal ini dilakukan untuk:

- a. Menjamin kualitas dan legalitas pupuk mengingat banyaknya pupuk palsu maupun pupuk bersubsidi untuk petani yang beredar di pasaran.
- b. Memperoleh jaminan pasokan yang pasti karena merupakan distributor utama sehingga dapat memenuhi pengadaan pupuk sebagaimana dibutuhkan.

BPK-RI menyarankan agar Badan Pengawas:

- a. Menegur secara tertulis Direktur PDPPSU supaya dalam menyetujui/menandatangani surat perjanjian kerja mempedomani ketentuan yang berlaku dan meningkatkan pengendalian serta pengawasan atas pelaksanaan pengadaan.
- b. Memerintahkan Direktur PDPPSU untuk menegur secara tertulis Panitia Pengadaan supaya dalam mengevaluasi pengadaan barang/jasa dan menyiapkan konsep Surat Perintah Kerja mempedomani ketentuan yang berlaku.

2. Pekerjaan Swakelola untuk Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan dan Tanaman Belum Menghasilkan Kelapa Sawit dan Pembuatan Sarana Karyawan pada Unit Kebun Patiluban dan Simpang Gambir Belum Sesuai Ketentuan

Pada tahun buku 2004 Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (PDPPSU) melakukan beberapa kegiatan operasional antara lain pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) kelapa sawit, Pekerjaan Pengadaan Tempat Penampungan Hasil, Pembuatan Pos Hansip, Rumah Kopel G-4, Rehabilitasi Kantor pada Unit Kebun Patiluban, serta Pembuatan Rumah Kopel G-6 untuk karyawan Unit Kebun Simpang Gambir. Realisasi seluruh kegiatan tersebut senilai Rp2.378.554.979,00, dengan uraian sebagai berikut.

- a. Unit Kebun Simpang Gambir sebesar Rp708.084.370,00 terdiri dari:
 - 1) Biaya Babat Gawangan Tanaman Menghasilkan sebesar Rp65.870.940,00.
 - 2) Biaya Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan sebesar Rp389.283.870,00
 - 3) Pembuatan 2 (dua) Unit Rumah Karyawan sebesar Rp252.929.560,00
- b. Unit Kebun Patiluban sebesar Rp1.670.470.609,00 terdiri dari:
 - 1) Biaya Babat Gawangan Tanaman Menghasilkan sebesar Rp43.385.529,00
 - 2) Biaya pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan sebesar Rp1.163.026.850,00
 - 3) Pembuatan Rumah G-4, TPH, Pos Hansip dan Kantor Administratur serta Barak Karyawan sebesar Rp464.058.230,00.

Rincian selengkapnya dalam lampiran I.

Dari pemeriksaan lebih lanjut atas pelaksanaan pekerjaan diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan secara swakelola sesuai dengan yang direncanakan, dengan jumlah dana sesuai dengan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Kantor Direksi Medan. Selain itu dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut juga diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Atas pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dibentuk panitia pekerjaan swakelola dan tidak ditunjuk penanggung jawab dengan Surat Ketetapan ataupun Surat Keputusan. Sebagai penanggung jawab hasil pekerjaan adalah Administratur sendiri dibantu oleh Kepala Tata Usaha (KTU), dan Para Asisten.

- b. Pengadaan bahan dan peralatan dilakukan dengan cara membeli langsung ke toko/panglong yang menyediakan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan.
- c. Pelaksana di lapangan tidak membuat Buku Laporan Harian tentang penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan, jadwal target penyelesaian pekerjaan serta laporan realisasi fisik dan keuangan.

Dari pemeriksaan fisik tanggal 12 s.d. 14 Mei 2005 diketahui bahwa semua pekerjaan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan perencanaan, namun hasil dari pekerjaan swakelola tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima, yang dapat mengganggu proses inventarisasi asset perusahaan dan penyajian di dalam Laporan Keuangan PDPPSU. Hal ini juga telah menjadi temuan dalam pemeriksaan sebelumnya oleh Tim BPK.

Kondisi itu tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentang “Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”:

- a. Lampiran I Bab III huruf B tentang Pekerjaan Swakelola point satu yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan swakelola perlu ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
 - 2) Penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
 - 3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.
 - 4) Pengawasan pekerjaan fisik dilapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk pengguna barang/jasa berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Bab III huruf C Tentang Pelaporan Pelaksanaan Swakelola, yang menyatakan bahwa:
 - 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada pengguna barang/jasa setiap bulan.
 - 2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh pengguna barang/jasa kepada menteri/kepala lembaga pemerintah Non

Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direktur Utama BUMN/BUMD terkait serta pejabat yang disamakan.

Penyimpangan itu mengakibatkan:

- a. PDPPSU tidak memperoleh harga yang bersaing dan pengeluaran tersebut belum memenuhi syarat sahnya suatu bukti pertanggungjawaban keuangan.
- b. Pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebut lemah dan jika terjadi masalah atas pelaksanaan pekerjaan tersebut di kemudian hari, perusahaan tidak dapat menuntut penanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Penyimpangan itu terjadi karena:

- a. Direktur belum sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penunjukan penanggung jawab pekerjaan swakelola.
- b. Administratur sebagai penanggung jawab pekerjaan swakelola dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- c. Direksi sebagai atasan langsung kurang melakukan pengawasan.

Direksi PDPPSU menyatakan bahwa pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM) dilakukan dengan cara swakelola karena belum terdapat kontraktor/masyarakat yang mempunyai kemampuan teknis untuk mengerjakan kegiatan pemeliharaan tersebut, mengingat usaha perkebunan kelapa sawit di daerah Simpang Gambir dan Patiluban masih relatif baru.

Berdasarkan pengalaman, untuk pembangunan sarana karyawan telah diserahkan kepada pihak kontraktor setempat, tetapi hasilnya kurang memuaskan, dan dalam pelaksanaan kontrak tersebut perusahaan menggunakan jasa konsultan sebagai pengawas proyek. Hal tersebut mengakibatkan biaya tinggi.

Untuk melaksanakan program tahun 2005 yang telah ditetapkan berdasarkan RAB yang disahkan, Direksi sudah menginstruksikan Administratur untuk mengerjakan secara swakelola sesuai dengan ketentuan teknis.

BPK-RI menyarankan agar Badan Pengawas PDPPSU:

- a. Menegur secara tertulis Direksi supaya dalam melaksanakan penunjukan penanggung jawab pekerjaan swakelola mengacu pada ketentuan yang berlaku dan meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan swakelola.
- b. Memerintahkan Direktur PDPPSU untuk menegur secara tertulis Administratur Unit Kebun Simpang Gambir dan Patiluban supaya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan pemeliharaan tanaman TM dan TBM secara swakelola mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3. Aplikasi Pemupukan Tahun 2004 Menggunakan Rekomendasi Pemupukan Tahun 2003

Pada tahun 2003 PDPPSU melaksanakan kerja sama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) untuk memberikan rekomendasi pemupukan tanaman menghasilkan pada Kebun Simpang Gambir dan Kebun Patiluban yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.157/DIR/SPK/PDP/2003 tanggal 5 Maret 2003 dan kerja sama dengan Asian Agri Group Research & Development Centre untuk memberikan rekomendasi pemupukan tanaman menghasilkan pada Unit Kebun Tanjung Kasau dan Unit Kebun Sei Kari.

Peninjauan lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi pemupukan tanaman kelapa sawit menghasilkan, dilaksanakan pada tanggal 17 – 22 Maret 2003 untuk Unit Kebun Simpang Gambir dan Unit Kebun Patiluban serta tanggal 14 - 15 April 2003 untuk Unit Kebun Tanjung Kasau dan Unit Kebun Sei Kari. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisa daun, analisa tanah, data curah hujan, data produksi serta sejarah realisasi pemupukan. Dari data tersebut maka disusun rekomendasi pemupukan tanaman kelapa sawit menghasilkan untuk tahun 2003, yaitu pada bulan Juni 2003 untuk Unit Kebun Simpang Gambir dan Unit Kebun Patiluban dan tanggal 28 April 2003 Unit Kebun Tanjung Kasau dan Unit Kebun Sei Kari. Selain itu rekomendasi pemupukan tahun 2003 menganjurkan agar pengambilan sampel daun pada tahun 2003 dilakukan dua bulan setelah pemberian seluruh jenis pupuk semester II tahun 2003 selesai, karena pengambilan sampel daun secara kontinyu tersebut penting dalam penentuan rekomendasi pemupukan setiap tahunnya.

Dari pemeriksaan atas dokumen terkait dengan pemupukan dan keterangan lisan dari Kepala Bagian Tanaman/Produksi/Tehnik/Pengolahan diketahui bahwa program pemupukan pada tahun 2004 masih menggunakan rekomendasi pemupukan untuk tahun 2003, dengan alasan bahwa dilihat dari kondisi tanaman secara visual di lapangan maka rekomendasi pemupukan untuk tahun 2003 masih sesuai digunakan untuk tahun 2004. Pengambilan sampel daun seperti yang disarankan oleh konsultan pemupukan juga tidak dilaksanakan.

Dari hasil pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah produksi, namun peningkatan tersebut diantaranya karena terdapat hasil produksi dari tanaman menghasilkan (TM) yang baru.

Kondisi itu tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan tahun 2004, karena rekomendasi pemupukan tahun 2003 adalah pedoman pemupukan Semester I dan II tahun 2003.

Penyimpangan itu mengakibatkan penggunaan rekomendasi pemupukan tahun 2003 untuk aplikasi Tahun 2004 tidak dapat diyakini akan memberikan dampak yang maksimal bagi tanaman karena kebutuhan unsur hara tanaman tiap tahun belum tentu sama.

Penyimpangan itu terjadi karena:

- a. Kepala Bagian Tanaman/Produksi/Tehnik/Pengolahan tidak menaati sepenuhnya ketentuan yang berlaku dalam memprogramkan pemupukan tahun 2004.
- b. Direktur kurang melakukan pengendalian dan pengawasan.

Direksi PDPPSU menyatakan bahwa penggunaan rekomendasi pemupukan tahun 2003 untuk aplikasi pemupukan tahun 2004 dapat dilaksanakan, apabila sesuai dengan hasil observasi lapangan, yaitu dengan memperhatikan kondisi visual tanaman dan tingkat pencapaian produksi TBS, membandingkan petunjuk gejala defisiensi hara/kelainan, serta memperhatikan apakah tanaman menunjukkan hasil pertumbuhan yang normal. Penetapan dosis, jenis dan waktu pemupukan dapat disesuaikan dan diteruskan sampai dengan tahun 2005. Dampak aplikasi pemupukan tahun 2004 dapat dilihat dari realisasi produksi TBS sampai dengan akhir bulan Mei 2005 untuk semua unit kebun dengan pencapaian hasil diatas target sebesar 10,19%.

Untuk tahun 2005 akan dilaksanakan rekomendasi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dengan pengajuan Surat Direksi No. 346/DIR-RU/PDP/2005 tanggal 31 Maret 2005 dan sedang dikerjakan sesuai Surat Perjanjian Kerja No. 470/DIR-SPK/2005 tanggal 3 Mei 2005.

BPK-RI menyarankan agar Direktur PDPPSU menegur secara tertulis Kepala Bagian Produksi, Tanaman, Pengolahan dan Teknik supaya dalam membuat program pemupukan tanaman sesuai dengan rekomendasi pemupukan untuk tahun bersangkutan.

4. Pemberian Pinjaman Kepada Koperasi Karyawan Perkebunan Tahun Buku 2004 Belum Memberikan Kontribusi bagi Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (PDPPSU)

Dalam rangka membantu perkembangan Koperasi Karyawan Perkebunan (KKP) pada Tahun Buku 2004 Direksi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada KKP.

Dari pemeriksaan atas dokumen-dokumen pinjaman tersebut diketahui bahwa untuk memenuhi kebijakan Direksi dimaksud, PDPPSU sampai dengan Desember 2004 telah merealisasikan bantuan pinjaman kepada KKP sebesar Rp336.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tgl/Bukti Kas	Jlh Pinjaman (Rp)	Keterangan
1	Permohonan Pinjaman No.26/KKP-MDN/02/04 19 Pebruari 2004	19-2-2004 336	133.750.000,00	Utk Pinjaman KKP unit kbn TK, SK,SG dan PL
2	Permohonan Pinjaman No.42/KKP-MDN/03/04 9 Maret 2004	16-3-2004 556	11.000.000,00	Utk Pembelian alat-alat pesta
3	Permohonan pinjaman No.144/KKP-MDN/8/04 18 Agustus 2004	16-8-2004 1701 24-8-2004 1750	80.000.000,00 89.500.000,00	Pembelian Kendaraan Toyota Dyna
4	Permohonan Pinjaman No. 241/KKP-MDN/12/ 2004 28 Desember 2004	21-12-2004 2620	22.500.000,00	Pembelian lembu untuk diterakkan di Patiluban.
Jumlah			336.750.000,00	

Dari pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen dan mekanisme pemberian pinjaman diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Pinjaman KKP direalisasikan/dicairkan melalui permohonan pinjaman dari pengurus koperasi yang ditujukan kepada Direksi, tanpa ada ikatan perjanjian antara PDPPSU dengan Pengurus Koperasi Pegawai.
- b. Atas pinjaman tersebut tidak diperhitungkan jasa/bunga pinjaman, sehingga PDPPSU sebagai pemberi pinjaman tidak memperoleh kontribusi atas pengeluaran dana sebesar Rp336.750.000,00.

Selain itu pencairan pinjaman tersebut diberikan oleh PDPPSU mendahului permohonan yang diajukan oleh pengurus koperasi. Untuk permohonan tanggal 18 Agustus 2004 pencairan pinjaman sudah dilakukan tanggal 16 Agustus 2004, dan untuk permohonan tanggal 28 Desember 2004 pencairan pinjaman sudah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2004. Dalam memberikan pinjaman, perusahaan juga tidak melakukan study kelayakan sebagai dasar dalam menentukan nilai pinjaman yang layak diberikan kepada KKP.

Kondisi itu tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-236/BMU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang "Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan", Bab IV tentang Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Pasal 11 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Besarnya Bunga Pinjaman Dana Program Bina Kemitraan Maksimal 12% per Tahun dengan Sistem Bunga Efektif. Selain itu seharusnya pemberian pinjaman dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman.

Penyimpangan itu mengakibatkan:

- a. PDPPSU tidak memperoleh pendapatan dari pemberian pinjaman kepada Koperasi Karyawan Perkebunan.
- b. PDPPSU akan mengalami kerugian jika KKP wan prestasi dalam hal ini PDPPSU tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut Koperasi Karyawan Perkebunan tersebut.

Penyimpangan tersebut terjadi karena Direksi tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam memberikan persetujuan atas pemberian pinjaman.

Direksi PDPPSU menyatakan bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum perusahaan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), penyertaan modal terdiri dari 99% Pemerintah Provinsi dan 1% Koperasi Karyawan Perkebunan (KKP) Kantor Medan.

Untuk memenuhi komposisi struktur modal tersebut, perusahaan mendukung keberadaan koperasi dengan memberikan kesempatan kepada koperasi untuk mengembangkan usahanya, dalam hal ini koperasi juga mengambil kredit dari lembaga keuangan yang dikenakan bunga komersil. Selain itu pada saat pendirian Perseroan Terbatas, koperasi sebagai salah satu pemegang saham harus menyetor sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai penyertaan modal. Dengan kondisi tersebut, maka perusahaan belum membebankan biaya atas pinjaman yang diberikan kepada koperasi.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Perusahaan adalah bahwa semua jasa dan usaha koperasi digunakan oleh perusahaan dalam bentuk pemanfaatan alat transportasi dan alat berat serta membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari karyawan unit kebun Simpang Gambir dan Patiluban. Dengan keberadaan koperasi maka tingkat harga bahan kebutuhan sehari-hari yang cukup tinggi dapat ditekan dan sangat membantu karyawan.

BPK-RI menyarankan agar Badan Pengawas PDPPSU menegur secara tertulis Direktur supaya dalam memberikan persetujuan pinjaman memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan menuangkan kerja sama tersebut dalam kontrak perikatan secara tertulis.

5. Penggunaan Sisa Bibit Kelapa Sawit Tahun Pembibitan 2002 dan 2003 Belum Efektif dan Efisien

Dalam laporan Desember 2004 Unit Kebun Sei Kari dan Unit Kebun Patiluban terdapat stock bibit kelapa sawit dengan rincian sebagai berikut.

No	Unit Kebun	Stock bibit (Pkk)	Harga satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Sei Kari	436	10.111,24	4.408.500,00
2	Patiluban	17.099	8.386,40	143.399.053,60
	Jumlah	17.535		147.807.553,60

Sisa bibit tersebut merupakan hasil pengadaan kecambah yang dibeli untuk kebutuhan kebun sendiri tahun pembibitan 2002 dan 2003, sebanyak lebih kurang 147.500 kecambah. Dari pengadaan tersebut telah diperhitungkan untuk keperluan seleksi kecambah, sisipan, afkir dan sisipan trans planting dengan rincian:

- Untuk seleksi kecambah = 5%
- Sisipan = 15%
- Afkir = 20%
- Sisipan Trans Planting = 5%

Pengadaan bibit tersebut dipergunakan untuk konversi tanaman sawit seluas 650 Ha tahun tanam 2004 di kebun Patiluban dan seluas 51,50 Ha di Unit Kebun Sei Kari.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa program pembukaan dan penanaman tersebut berlanjut sampai tahun 2005, yaitu program penanaman di Kebun Patiluban seluas 100 Ha. Program penanaman sisa 100 Ha tersebut diproyeksikan akan menggunakan bibit dari hasil pembibitan tahun 2002 dan 2003, yang sampai dengan pemeriksaan dilakukan pada bulan Mei 2005 telah berumur 29 bulan.

Menurut penjelasan dari Administratur Unit Kebun Sei Kari dan Administratur Unit Kebun Patiluban diketahui bahwa sisa/stock bibit tersebut akan dipergunakan untuk penanaman dan penyisipan pada areal konversi kelapa sawit yang berumur kurang dari satu tahun. Penggunaan bibit yang sudah lewat umur ideal penanaman akan menimbulkan biaya

tinggi yaitu pada biaya pembongkaran bibit, biaya langsir dan angkut bibit serta biaya penanaman bibit di areal.

Seharusnya untuk menghindari penggunaan bibit yang terlalu tua, setelah diperhitungkan untuk kebutuhan penyisipan tanaman yang rusak atau mati sebanyak 15% atau dengan pesentase yang dapat ditingkatkan karena tingginya angka kematian tanaman kelapa sawit karena hama gangguan hewan, maka sebaiknya sisa bibit yang sudah lewat usia tanam dapat dipertimbangkan untuk dijual. Penjualan akan memberikan kontribusi kepada perusahaan sebagai pendapatan lain-lain.

Sisa bibit setelah diperhitungkan untuk penyisipan tanaman 15% merupakan bibit yang kurang efektif untuk ditanam karena telah melewati batas umur penanaman bibit tanam, diperhitungkan sebesar Rp125.636.421,10 dengan rincian:

- a. Unit Kebun Sei Kari senilai Rp3.747.225,54 $\{436 - (15\% \times 436)\} \times \text{Rp}10.111,24\}$
- b. Unit Kebun Patiluban Rp121.889.195,56 $\{17.099 - (15\% \times 17.099) \times \text{Rp}8.386,40\}$

Kondisi itu tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa umur bibit yang tepat dan baik untuk dipindahkan dan ditanam adalah berumur antara 12 s.d. 14 bulan.

Penyimpangan itu mengakibatkan sisa bibit yang telah melewati batas waktu tanam bila dilakukan pemindahan lebih rentan terhadap kematian akibat terganggunya akar tanaman yang harus dipotong pada saat pembongkaran dan akan menambah biaya pekerjaan penanaman bibit tua yang sulit dilaksanakan, dan membuat biaya penanaman menjadi tinggi.

Penyimpangan itu terjadi karena:

- a. Kebijakan perusahaan untuk tetap mempertahankan sisa bibit tahun 2002-2003 yang akan digunakan untuk kebutuhan konversi tahun 2005.
- b. Penyemaian kecambah tidak disesuaikan dengan kecepatan dan ketepatan waktu pembukaan lahan.
- c. Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kurang melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Direksi PDPPSU menyatakan bahwa adanya stok bibit kelapa sawit sebanyak 17.099 pokok di Unit Kebun Patiluban adalah untuk kebutuhan penanaman seluas 100 ha yang mengalami penundaan dan merupakan konversi lanjutan dari luas 650 ha. Hal tersebut terjadi karena curah hujan yang tinggi. Sedangkan untuk Unit Kebun Sei Kari stok bibit sebanyak 436 pokok adalah untuk kebutuhan penyisipan tanaman tahun 2003 sampai dengan tahun ke-2 setelah tanam sehingga dapat menyesuaikan tingkat pertumbuhan dengan tanaman awal seluas 51,50 ha.

BPK-RI menyarankan agar Badan Pengawas PDPPSU:

- a. Menegur secara tertulis Direktur supaya dalam membuat kebijakan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Memerintahkan Direktur PDPPSU untuk menegur secara tertulis Kabag Produksi, Tanaman, Pengolahan dan Teknik supaya dalam penyemaian kecambah disesuaikan dengan kecepatan dan ketepatan waktu pembukaan lahan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PENGENDALIAN INTERN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Imam Bonjol No. 22 Telp. (061) 4519039 Fax. (061) 4538140 Medan 20152

Kepada Yth.

- 1. Badan Pengawas PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara**
- 2. Direksi PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara**

di

Medan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Neraca PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2004, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 3 Juni 2005.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas Laporan Keuangan PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, kami mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas Laporan Keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.

Manajemen PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat

saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam kelompok berikut ini:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penaksiran risiko
- c. Aktivitas pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi, dan
- e. Pemantauan

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kami mencatat masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada lampiran.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Joseph Sinaga, SE.Ak
Register Negara No. D-12142**

Medan, 3 Juni 2005

1. Terdapat Kelemahan pada Sistem Pembukuan dan Sistem Pengendalian Intern yang Dapat Mempengaruhi Pengambilan Keputusan pada Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (PDPPSU)

Pelaksanaan Pembukuan dan Pengendalian Intern pada PDPPSU dilaksanakan berdasarkan sistem dan prosedur yang mengacu kepada praktik-praktik yang sehat sehingga tujuan dari pengendalian dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan, yaitu mengamankan asset perusahaan, menguji ketepatan pencatatan dan keandalan data akuntansi, menggalakkan efisiensi serta mendorong ditaatinya kebijaksanaan manajemen. Namun demikian dari pemeriksaan yang dilakukan pada Kantor Direksi PDPPSU di Medan dan unit-unit kebun yaitu Kebun Tanjung Kasau, Kebun Sei Kari, Kebun Simpang Gambir dan Kebun Patiluban diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Metode Penilaian Persediaan Tidak Konsisten

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Unit Kebun Sei Kari, Kebun Tanjung Kasau, Kebun Simpang Gambir dan Kebun Patiluban diketahui bahwa administrasi atau metode penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai persediaan belum sepenuhnya sejalan dengan kebijaksanaan akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan.

Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode rata-rata (*Average*), namun dari hasil pemeriksaan atas dokumen Laporan Bulanan Buku Persediaan Barang dan Kartu Persediaan pada unit-unit kebun diketahui bahwa penilaian persediaan sebagian masih dilakukan berdasarkan metode FIFO dan LIFO. Namun demikian perbedaan nilai persediaan dibandingkan dengan metode average tidak material karena volume persediaan tidak banyak dan perbedaan harga yang kecil.

Khusus pada Unit Kebun Simpang Gambir, juga diketahui bahwa Kartu Persediaan dan Buku Gudang tidak dikerjakan secara *up to date* (mutakhir).

b. Perlakuan Terhadap Bibit Mati dan Afkir Tidak Seragam

Untuk kebutuhan ekstensifikasi usaha maka PDPPSU membuat kebijaksanaan melakukan pembibitan sendiri dengan cara penyemaian kecambah dan pembelian bibit sawit. Bibit-bibit tersebut dicatat dalam neraca dan digolongkan kedalam jenis aktiva lain-lain.

Dari pemeriksaan atas laporan keuangan unit kebun diketahui bahwa perlakuan akuntansi untuk bibit mati dan afkir tidak sama pada semua unit kebun. Perlakuan akuntansi untuk bibit yang mati dan afkir pada unit Kebun Sei Kari dan Tanjung Kasau dikeluarkan dari neraca dengan cara mengakui biaya kerugian bahan dan mengurangi nilai bibit sebesar nilai bibit yang mati dan afkir, dikalikan harga pokok. Namun di Kebun Patiluban dan Kebun Simpang Gambir pencatatan tersebut tidak dilakukan dan sebagai gantinya nilai bibit yang mati atau afkir tersebut tetap diperhitungkan dalam perhitungan harga pokok bibit yang tersisa. Seharusnya bibit yang mati dan afkir langsung dibiayakan karena sudah tidak akan dipakai dalam penanaman.

c. Pencatatan dan Pelaksanaan Kewajiban Pajak Belum Tertib

Sebagai badan usaha, PDPPSU mempunyai kewajiban kepada negara. Kewajiban tersebut antara lain kewajiban pajak yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 25/29 dan PPN Keluaran. Khusus untuk PPh pasal 21 sudah dibayarkan oleh masing-masing unit kerja kecuali untuk Unit Kebun Sei Kari yang masih bergabung dengan Kantor Direksi Medan.

Dari hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut.

1. Hutang Pajak PPN yang timbul dari koreksi audit tahun buku 2002 belum diselesaikan

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun buku 2002 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan koreksi tambah pada Hutang Pajak-PPN karena ada PPN yang belum dipotong dari beberapa transaksi yaitu:

- Ongkos angkut TBS dan latex yang dibayarkan pada UD Mesapura	Rp 37.834.200,00
- Pembayaran sewa alat berat di kebun Simpang Gambir	Rp 42.025.000,00
- Penjualan hasil kebun pada Haerudi Kesuma dan PT Fajar Delitua	<u>Rp 26.647.178,00</u>
Total	<u>Rp 106.506.378,00</u>

Koreksi tersebut dapat diterima oleh PDPPSU dan telah dilakukan pencatatannya. Namun demikian sampai dengan pemeriksaan selesai belum ada realisasi pembayaran/ pemotongan dan penyetoran atas hutang pajak tersebut.

2. Pencatatan antar unit kerja belum seragam

Sampai akhir tahun 2004 pencatatan hutang PPh pasal 21 di Kebun Patiluban masih dilakukan di akun Hutang Lain-lain padahal untuk perkiraan tersebut sudah ada akunnya tersendiri sehingga hutang PPh pasal 21 pada laporan konsolidasi belum menunjukkan nilai kewajiban yang sebenarnya. Namun demikian telah dilakukan koreksi atas nilai hutang PPh pasal 21.

3. Terdapat keterlambatan pembayaran PPh pasal 21

Pembayaran atas PPh pasal 21 yang melewati batas waktu, yaitu:

Tj. Kasau		Sp.Gambir		Patiluban	
Masa Pajak	Tgl Bayar	Masa Pajak	Tgl Bayar	Masa Pajak	Tgl Bayar
Mei	18/06/2004	Juni	27/07/2004	Januari	04/03/2004
Juni	27/07/2004	Juli	23/08/2004	Mei	14/06/2004
Juli	23/08/2004	Agustus	11/09/2004	Juni	30/07/2004
Agustus	11/09/2004	September	15/10/2004	Juli	31/08/2004
September	11/10/2004			Agustus	15/10/2004
November	20/12/2004			September	15/10/2004
				Oktober	12/11/2004
				November	17/12/2004

Selain itu, pembayaran PPh pasal 21 masa pajak Desember tahun 2003 oleh Unit Kebun Simpang Gambir dan Patiluban baru dilakukan pada bulan Maret tahun 2004, bersamaan dengan masa pajak Januari dan Februari tahun 2004. Atas keterlambatan tersebut Kantor Pelayanan Pajak Padangsidempuan telah mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.248.862,00.

d. Pengalokasian Biaya Operasional pada Perhitungan Harga Pokok Produksi Kelapa Sawit dan Karet Unit Kebun Tanjung Kasau dan Kebun Sei Kari Belum Tepat

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2004 pada Unit Kebun Tanjung Kasau dan Unit Kebun Sei Kari yang masing-masing memiliki tanaman kelapa sawit dan tanaman karet, diketahui bahwa terdapat pembebanan biaya operasional yang belum proporsional terhadap kedua jenis tanaman tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel rekapitulasi biaya operasional Unit Kebun Tanjung Kasau dan Unit Kebun Sei Kari tahun 2004 sebagai berikut.

Tanjung Kasau	Sawit (Rp)	Karet (Rp)
<u>Biaya langsung</u>		
600 Gaji & tunjangan staf	56.250.261,00	115.476.586,00
601 Pemeliharaan tanaman	1.501.318.700,00	929.088.761,00
602 Panen & pengangkutan	1.867.259.903,00	6.802.986.009,00
603 Biaya pengolahan	-	417.285.208,00
604 Pemeliharaan bangunan	-	-
605 Biaya pengepakan	-	-
606 Asuransi	-	1.588.680,00
	3.424.828.864,00	8.266.425.244,00
<u>Biaya tidak langsung</u>		
400 Gaji & tunjangan staf	91.422.307,00	209.232.153,00
401 Gaji pegawai non staf	19.168.530,00	524.441.631,00
402 Honorarium	-	-
406 Pengangkutan/perjalanan	100.000,00	159.838.092,00
410 Pemeliharaan rumah	-	121.424.025,00
411 Pemeliharaan bangunan	-	162.904.860,00
412 Pemeliharaan mesin	-	-
413 Pemeliharaan jalan	-	-
414 Pemeliharaan inventaris	-	13.348.000,00
420 Iuran dan sumbangan	-	60.742.900,00
421 Pajak dan sewa tanah	56.036.875,00	295.355.086,00
422 Asuransi	-	11.490.606,00
423 Biaya keamanan	533.934.249,00	806.776.756,00
424 Biaya penerangan	-	55.637.784,00
425 Biaya air	-	4.848.498,00
426 Pengeluaran lain-lain	-	171.276.872,00
428 Biaya pengembangan	-	-
430 Biaya pengawasan	-	-
441 Biaya konsultasi/inspeksi	-	5.833.338,00
442 Biaya kredit bank	-	-
	700.661.961,00	2.603.150.601,00

Sei Kari	Sawit (Rp)	Karet (Rp)
<u>Biaya langsung</u>		
600 Gaji & tunjangan staf	-	41.436.513,00
601 Pemeliharaan tanaman	110.103.277,00	392.846.837,00
602 Panen & pengangkutan	231.269.898,00	1.433.798.470,00
603 Biaya pengolahan	-	87.442.977,00
604 Pemeliharaan bangunan	-	2.380.927,00
605 Biaya pengepakan	-	-
606 Asuransi	-	-
	341.373.175,00	1.957.905.724,00
<u>Biaya tidak langsung</u>		
400 Gaji & tunjangan staf	-	75.739.569,00
401 Gaji pegawai non staf	-	186.992.709,00
402 Honorarium	-	-
406 Pengangkutan/perjalanan	-	106.537.834,00
410 Pemeliharaan rumah	-	31.413.719,00
411 Pemeliharaan bangunan	-	5.574.679,00
412 Pemeliharaan mesin	-	-
413 Pemeliharaan jalan	-	5.973.750,00
414 Pemeliharaan inventaris	-	8.457.500,00
420 Iuran dan sumbangan	-	5.583.675,00
421 Pajak dan sewa tanah	-	49.472.305,00
422 Asuransi	-	-
423 Biaya keamanan	-	227.962.462,00
424 Biaya penerangan	-	5.822.935,00
425 Biaya air	-	-
426 Pengeluaran lain-lain	-	43.101.854,00
428 Biaya pengembangan	-	-
430 Biaya pengawasan	-	-
441 Biaya konsultasi/inspeksi	-	400.000,00
442 Biaya kredit bank	-	-
	-	753.032.991,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengalokasian biaya-biaya operasional tersebut lebih besar kepada tanaman karet. Seharusnya pengalokasian biaya-biaya operasional dilakukan secara proporsional dengan dasar perbandingan yang dapat diterima antara lain berdasarkan luas areal tanaman atau persentase penjualan masing-masing komoditi maupun hal lain yang layak dipergunakan sebagai faktor pembagi.

Kondisi itu tidak sesuai dengan:

- a. Prinsip akuntansi dalam penetapan/penilaian terhadap akun-akun (perkiraan) di Neraca yang seharusnya dilakukan secara konsisten dan seragam serta sejalan dengan kebijakan perusahaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 541/KMK.04/2000 pasal 1 (1) yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Selain itu pencatatan seharusnya dilakukan secara *up to date* (mutakhir) sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dalam praktik akuntansi biaya, seluruh biaya operasional seharusnya dibebankan secara wajar dan proporsional terhadap produk yang dihasilkan (kelapa sawit dan karet).

Penyimpangan itu mengakibatkan:

- a. Nilai Persediaan dan Nilai Aktiva Lain-lain yang tercantum pada Neraca belum menginformasikan nilai yang sebenarnya.
- b. Harga pokok produksi kelapa sawit dan karet pada Unit Kebun Tanjung Kasau dan Sei Kari belum mencerminkan harga yang wajar.
- c. PDPPSU harus membayar denda keterlambatan pembayaran PPh 21 sebesar Rp1.248.862,00.
- d. Negara terlambat menerima pendapatan dari PPN sebesar Rp106.506.378,00.

Penyimpangan itu terjadi karena:

- a. Direksi dan atasan langsung masing-masing petugas terkait di unit kebun, kurang melakukan pengawasan dan pengendalian.
- b. Bagian SPI tidak melakukan pengawasan sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

- c. Direksi belum menetapkan sistem akuntansi yang baku untuk PDPPSU yang berisi seluruh prosedur operasional standar sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- d. PDPPSU sebagai wajib pungut (sampai dengan akhir tahun 2003) kurang optimal dalam melakukan koordinasi dengan wajib pajak dan jarak unit-unit kebun dengan KPP cukup jauh.

Terhadap kelemahan pada Sistem Pembukuan dan Sistem Pengendalian Intern tersebut, Direksi PDPPSU Provinsi Sumatera Utara menyatakan:

a. Metode Penilaian Persediaan Tidak Konsisten

Dalam penyajian Laporan Keuangan PDPPSU telah mempedomani Prinsip Akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai rencana yang ditetapkan, pengendalian dilakukan dengan mengamankan asset perusahaan, menguji ketepatan pencatatan akuntansi dan menggalakkan efisiensi. Secara garis besar, PDPPSU menggunakan metode penilaian persediaan yaitu metode Rata-rata (*Average*), tetapi dalam pelaksanaannya unit kebun masih ada yang menggunakan metode LIFO dan FIFO.

b. Perlakuan Terhadap Bibit Mati dan Afkir Tidak Seragam

Perlakuan akuntansi untuk bibit mati dan afkir akan diseragamkan.

c. Pencatatan dan Pelaksanaan Kewajiban Pajak Belum Tertib

Hutang Pajak PPN yang timbul dari koreksi audit tahun buku 2002 belum diselesaikan, menunggu hasil dari pemeriksaan pajak tahun 2002.

Pencatatan atas PPh 21 antar unit kebun akan diseragamkan serta keterlambatan pembayaran PPh 21 akan didisiplinkan.

d. Pengalokasian Biaya Operasional pada Perhitungan Harga Pokok Produksi Kelapa Sawit dan Karet Unit Kebun Tanjung Kasau dan Kebun Sei Kari Belum Tepat

Pengalokasian biaya operasional pada perhitungan harga pokok produksi kelapa sawit dan karet Unit Kebun Tanjung Kasau dan Sei Kari untuk tahun 2005 telah disempurnakan.

BPK-RI menyarankan agar Badan Pengawas:

- a. Menegur secara tertulis Direktur PDPPSU supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap masalah administrasi keuangan dan kinerja pegawai.
- b. Memerintahkan Direktur PDPPSU supaya menerapkan prosedur operasional standar sebagai pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkungan PDPPSU.
- c. Memerintahkan Direktur PDPPSU menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian khususnya masalah administrasi keuangan dan perpajakan, serta lebih meningkatkan koordinasi dengan wajib pajak.
- d. Memerintahkan Direktur PDPPSU menegur secara tertulis Kepala Bagian SPI supaya melaksanakan audit internal sesuai dengan Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan.

2. Kelemahan-kelemahan Lain dalam Sistem Pengendalian Intern yang Perlu Diungkapkan

Selain permasalahan tersebut di atas, dari hasil pemeriksaan dapat dikemukakan beberapa kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki pada masa yang akan datang dan harus diungkapkan antara lain:

- a. Dalam pembuatan perencanaan, PDPPSU hanya membuat rencana tahunan dan belum membuat rencana jangka panjang (*Corporate Plan*). Namun demikian ada beberapa bentuk rencana jangka panjang yang telah dilaksanakan walaupun tidak tersaji dalam bentuk tertulis, antara lain pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kapasitas 20 ton/jam di Kebun Tanjung Kasau Kabupaten Asahan. Menurut keterangan Kepala Bagian Tanaman/Produksi/Teknik/Pengolahan PDPPSU juga telah merencanakan untuk membangun satu unit PKS kapasitas 30 ton/jam di Kebun Simpang Gambir Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan tidak dibuatnya rencana jangka panjang dalam bentuk tertulis sebagai target yang hendak dicapai, misalnya rencana untuk Ekstensifikasi/Pengembangan ataupun Diversifikasi jenis usaha, maka kelangsungan usaha PDPPSU belum dapat dinilai.

- b. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 1985, Direktur PDPPSU mengeluarkan Surat Keputusan No. 21/DIR/SKPTS/PDP/1992 tanggal 30 Desember 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDPPSU diantaranya pada Bagian Keenam diatur tentang Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan perusahaan seperti administrasi pembukuan, keuangan, penjualan, produksi, pengolahan dan tanaman serta memberikan laporan, memberikan pendapat/saran atas hasil pemeriksaannya kepada direksi. Sesuai dengan maksud pembentukannya maka SPI telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2004 yaitu jadwal kegiatan pengawasan yang akan dilakukan SPI dalam Tahun 2004. Namun demikian PKPT tersebut tidak dapat dilaksanakan karena padatnya jadwal penugasan yang diperintahkan secara langsung oleh direksi diluar dari kegiatan utama SPI sebagai bagian pengawasan internal perusahaan. Penugasan tersebut antara lain menangani secara langsung proses pembentukan/ peralihan bentuk hukum badan usaha dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dengan demikian fungsi dari SPI belum dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan rencana. Namun demikian SPI mengambil kebijakan untuk melakukan pengawasan

beriringan dengan penugasan lain yang dibebankan oleh direksi pada SPI. Pelaksanaan pengawasan demikian belum dapat memberikan hasil yang maksimal.

Hal tersebut belum sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Satuan Pengawasan Intern sesuai dengan yang dimaksudkan dalam SK Direksi tersebut.

- c. Dari pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) diketahui bahwa PDPPSU belum mempunyai pedoman sistem akuntansi yang permanen. SPI dan Bagian Keuangan telah membuat Draft Sistem dan Prosedur Akuntansi sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan PDPPSU, namun draft tersebut masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan sebelum disahkan oleh Badan Pengawas menjadi Sistem dan Prosedur Akuntansi PDPPSU.

Dalam pelaksanaan di lapangan PDPPSU mempedomani sistem dan prosedur serta prinsip akuntansi yang berlaku umum dan menerapkannya secara konsisten.

- d. PDPPSU telah menyusun pedoman yang menjadi standar ketepatan waktu penyusunan laporan masing-masing unit kerja, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi penyampaian laporan bulanan dari unit kerja kebun yang terlambat sehingga menghambat proses penyusunan Laporan Bulanan Konsolidasi dan Laporan Keuangan PDPPSU Tahun 2004 yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik oleh Badan Pengawas maupun oleh Direksi PDPPSU.

Selain itu, kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam proses penyusunan laporan keuangan belum maksimal dan jumlah personil yang mengerjakan pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal itu, BPK-RI menyarankan agar Direksi PDPPSU membuat rencana jangka panjang secara tertulis, lebih memfungsikan SPI sesuai PP No. 24 Tahun 1985 dan SK Direksi No. 21/DIR/SKPTS/PDP/1992, serta menetapkan pedoman sistem akuntansi yang permanen dan pedoman penyusunan laporan sebagaimana mestinya.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BIAYA PERAWATAN
TBM 2001 UNIT KEBUN PATILUBAN (KELAPA SAWIT) 50 Ha.**

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	988/Dir/PDP/2003	12/31/03	4,248,600.00
2	Pebruari	58/Dir/PDP/2004	1/31/04	2,715,100.00
3	Maret	138/Dir/PDP/2004	2/27/04	3,026,850.00
4	April	229/Dir/PDP/2004	3/31/04	1,628,850.00
5	Mei	312/Dir/PDP/2004	4/30/04	5,582,850.00
6	Juni	391/Dir/PDP/2004	5/31/04	328,350.00
7	Juli	479/Dir/PDP/2004	6/30/04	4,475,000.00
8	Agustus	603/Dir/PDP/2004	7/30/04	2,736,750.00
9	September	674/Dir/PDP/2004	8/31/04	3,174,500.00
10	Oktober	769/Dir/PDP/2004	9/30/04	1,628,850.00
11	Nopember	862/Dir/PDP/2004	10/29/04	3,174,500.00
12	Desember	965/Dir/PDP/2004	11/30/04	2,736,750.00
Jumlah				35,456,950.00

**BIAYA PERAWATAN
TBM 2001 UNIT KEBUN PATILUBAN (KELAPA SAWIT) 40 Ha.**

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	987/Dir/PDP/2003	12/31/03	3,520,040.00
2	Pebruari	57/Dir/PDP/2004	1/30/04	2,357,560.00
3	Maret	129/Dir/PDP/2004	2/27/04	2,542,640.00
4	April	230/Dir/PDP/2004	3/31/04	1,303,080.00
5	Mei	313/Dir/PDP/2004	4/30/04	4,777,120.00
6	Juni	392/Dir/PDP/2004	5/31/04	262,680.00
7	Juli	480/Dir/PDP/2004	6/30/04	3,520,040.00
8	Agustus	606/Dir/PDP/2004	7/30/04	2,537,560.00
9	September	675/Dir/PDP/2004	8/31/04	2,664,960.00
10	Oktober	770/Dir/PDP/2004	9/30/04	1,303,080.00
11	Nopember	861/Dir/PDP/2004	10/29/04	2,664,960.00
12	Desember	966/Dir/PDP/2004	11/30/04	2,357,560.00
Jumlah				29,811,280.00

BIAYA PERAWATAN
TBM 2002 UNIT KEBUN PATILUBAN (KELAPA SAWIT) 250 Ha.

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	986/Dir/PDP/2003	12/31/03	34,072,250.00
2	Pebruari	56/Dir/PDP/2004	1/31/04	36,401,750.00
3	Maret	86/Dir/PDP/2004	2/27/04	23,496,500.00
4	April	227/Dir/PDP/2004	3/31/04	31,655,750.00
5	Mei	315/Dir/PDP/2004	4/30/04	42,840,500.00
6	Juni	394/Dir/PDP/2004	5/31/04	31,529,250.00
7	Juli	489/Dir/PDP/2004	6/30/04	31,655,750.00
8	Agustus	601/Dir/PDP/2004	7/30/04	38,058,500.00
9	September	671/Dir/PDP/2004	8/31/04	31,529,250.00
10	Oktober	767/Dir/PDP/2004	9/30/04	31,655,750.00
11	Nopmber	864/Dir/PDP/2004	10/29/04	44,434,500.00
12	Desember	963/Dir/PDP/2004	11/30/04	25,153,250.00
Jumlah				402,483,000.00

BIAYA PERAWATAN
TBM 2002 UNIT KEBUN PATILUBAN (KELAPA SAWIT) 160 Ha.

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	985/Dir/PDP/2003	12/31/03	25,856,320.00
2	Pebruari	55/Dir/PDP/2004	1/30/04	23,813,440.00
3	Maret	137/Dir/PDP/2004	2/27/04	15,276,000.00
4	April	228/Dir/PDP/2004	3/31/04	24,595,360.00
5	Mei	314/Dir/PDP/2004	31/04/2004	27,951,200.00
6	Juni	389/Dir/PDP/2004	5/31/04	20,433,780.00
7	Juli	490/Dir/PDP/2004	6/30/04	20,514,720.00
8	Agustus	602/Dir/PDP/2004	7/30/04	24,890,720.00
9	September	673/Dir/PDP/2004	8/31/04	16,353,120.00
10	Oktober	768/Dir/PDP/2004	9/30/04	20,514,720.00
11	Nopmber	863/Dir/PDP/2004	10/29/04	24,890,720.00
12	Desember	964/Dir/PDP/2004	11/30/04	16,353,120.00
Jumlah				261,443,220.00

BIAYA PERAWATAN
TBM 2003 UNTI KEBUN PATILUBAN (KELAPA SAWIT) 200 Ha.

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	984/Dir/PDP/2003	12/31/03	35,298,400.00
2	Pebruari	54/Dir/PDP/2004	1/30/04	37,687,000.00
3	Maret	131/Dir/PDP/2004	2/27/04	30,411,400.00
4	April	239/Dir/PDP/2004	3/31/04	37,757,800.00
5	Mei	316/Dir/PDP/2004	4/30/04	39,831,600.00
6	Juni	393/Dir/PDP/2004	5/31/04	32,555,800.00
7	Juli	488/Dir/PDP/2004	6/30/04	37,757,800.00
8	Agustus	600/Dir/PDP/2004	7/30/04	39,831,600.00
9	September	672/Dir/PDP/2004	8/31/04	32,555,800.00
10	Oktober	766/Dir/PDP/2004	9/30/04	37,757,800.00
11	Nopmber	865/Dir/PDP/2004	10/29/04	39,831,600.00
12	Desember	962/Dir/PDP/2004	11/30/04	32,555,800.00
Jumlah				433,832,400.00

BIAYA PERAWATAN Babat Gawangan
TM UNIT KEBUN PATILUBAN (KELAPA SAWIT)

No	Bulan	SPK	Tanggal	Luas (Ha)	Nilai (Rp)
1	Januari	08/Dir/PDP/2004	1/9/04	156.68	2,647,892.00
				48.97	827,593.00
2	Pebruari	78/Dir/PDP/2004	2/6/04	152.57	2,578,433.00
				44.78	756,782.00
3	Maret	124/Dir/PDP/2004	2/27/04	159.50	2,695,550.00
				48.97	827,593.00
4	April	231/Dir/PDP/2004	3/31/04	156.68	2,835,908.00
				44.78	810,518.00
5	Mei	310/Dir/PDP/2004	4/30/04	129.53	2,344,493.00
					886,357.00
6	Juni	390/Dir/PDP/2004	5/31/04	182.55	3,304,155.00
				44.78	810,518.00
7	Juli	499/Dir/PDP/2004	6/30/04	156.68	2,835,908.00
				48.97	886,357.00
8	Agustus	605/Dir/PDP/2004	7/30/04	129.53	2,344,493.00
				44.78	810,518.00
9	September	678/Dir/PDP/2004	8/31/04	182.55	3,304,155.00
				48.97	886,357.00
10	Oktober	817/Dir/PDP/2004	10/12/04	156.68	2,835,908.00

11	Nopmber	881/Dir/PDP/2004	10/29/04	129.52	810,518.00
				48.97	2,344,493.00
12	Desember	980/Dir/PDP/2004	11/30/04	182.55	886,357.00
				44.78	3,304,155.00
Jumlah					810,518.00
					43,385,529.00

NO	URAIAN	Tanggal	Nilai (Rp)
1	No. 612/DIR/PDP/2003 Pembuatan Barak Karyawan	8/3/04	21,795,650.00
2	No. 17/DIR/PDP/2004 Pembuatan TPH, Rehabilitasi bangunan ex pabrik, Pos Hansip	1/16/04	111,508,800.00
3	No. 187/DIR/PDP/2004 Rehabilitasi bangunan ex- kamar asap	3/12/04	132,336,950.00
4	No.340/DIR/PDP/2004 Tambahkan biaya bangunan ex- kamar asap dan pembuatan pagar kantor	5/6/04	64,281,380.00
5	No. 500/DIR/PDP/2004 Rehabilitasi bangunan ex- pabrik menjadi G-4	6/30/04	134,135,450.00
Jumlah			464,058,230.00

REKAPITULASI:

1	Biaya pemeliharaan TBM	1,163,026,850.00
2	Biaya babat gawangan	43,385,529.00
3	Pembuatan Sarana Karyawan	464,058,230.00
		1,670,470,609.00

**BIAYA PERAWATAN Babat Gawangan
TM UNIT KEBUN SIMPANG GAMBIR (KELAPA SAWIT)**

No	Bulan	SPK	Tanggal	Luas (Ha)	Nilai (Rp)
1	Januari	991/Dir/PDP/2004	12/31/03	73.61	1,244,009.00
				258.27	4,364,763.00
2	Pebruari	63/Dir/PDP/2004	1/30/04	130.94	2,212,886.00
				208.50	3,523,650.00
3	Maret	156/Dir/PDP/2004	3/1/04	91.44	1,545,336.00

4	April	232/Dir/PDP/2004	3/31/04	147.09	2,485,821.00
				96.65	1,749,365.00
				312.18	5,650,458.00
5	Mei	311/Dir/PDP/2004	4/30/04	107.90	1,952,990.00
				15.99	2,798,079.00
6	Juni	384/Dir/PDP/2004	5/31/04	114.48	2,072,088.00
				201.00	3,638,100.00
7	Juli	498/Dir/PDP/2004	6/30/04	73.61	1,332,341.00
				258.27	4,674,687.00
8	Agustus	604/Dir/PDP/2004	7/30/04	118.40	2,143,040.00
				198.50	3,230,850.00
9	September	676/Dir/PDP/2004	8/31/04	103.98	1,882,038.00
				148.54	2,688,574.00
10	Oktober	816/Dir/PDP/2004	10/12/04	84.11	1,522,391.00
				288.12	5,214,972.00
11	Nopember	882/Dir/PDP/2004	10/29/04	107.90	1,952,990.00
				148.65	2,690,565.00
12	Desember	979/Dir/PDP/2004	12/1/04	114.48	2,072,088.00
				178.39	3,228,859.00
Jumlah					65,870,940.00

**BIAYA PERAWATAN
TBM 2001 UNIT KEBUN SIMPANG GAMBIR (KELAPA SAWIT) 20 Ha.**

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	983/Dir/PDP/2003	12/31/03	1,760,020.00
2	Pebruari	59/Dir/PDP/2004	1/30/04	1,178,780.00
3	Maret	130/Dir/PDP/2004	2/27/04	1,271,320.00
4	April	237/Dir/PDP/2004	3/31/04	651,540.00
5	Mei	317/Dir/PDP/2004	4/30/04	2,388,560.00
6	Juni	386/Dir/PDP/2004	5/31/04	131,340.00
7	Juli	487/Dir/PDP/2004	6/30/04	1,852,680.00
8	Agustus	599/Dir/PDP/2004	7/30/04	1,187,440.00
9	September	670/Dir/PDP/2004	8/31/04	1,332,480.00
10	Oktober	765/Dir/PDP/2004	9/30/04	651,540.00
11	Nopember	855/Dir/PDP/2004	10/29/04	1,332,480.00
12	Desember	961/Dir/PDP/2004	11/30/04	1,187,440.00
Jumlah				14,925,620.00

BIAYA PERAWATAN
TBM 2001 UNIT KEBUN SIMPANG GAMBIR (KELAPA SAWIT) 70 Ha.

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	982/Dir/PDP/2003	12/31/03	5,948,040.00
2	Pebruari	60/Dir/PDP/2004	1/30/04	3,801,140.00
3	Maret	134/Dir/PDP/2004	2/27/04	4,237,590.00
4	April	238/Dir/PDP/2004	3/31/04	2,280,390.00
5	Mei	326/Dir/PDP/2004	4/30/04	7,815,990.00
6	Juni	387/Dir/PDP/2004	5/31/04	459,690.00
7	Juli	486/Dir/PDP/2004	6/30/04	6,265,000.00
8	Agustus	598/Dir/PDP/2004	7/30/04	3,831,450.00
9	September	669/Dir/PDP/2004	8/31/04	4,444,300.00
10	Oktober	764/Dir/PDP/2004	9/30/04	2,280,390.00
11	Nopember	856/Dir/PDP/2004	10/29/04	4,444,300.00
12	Desember	960/Dir/PDP/2004	11/30/04	3,831,450.00
Jumlah				49,639,730.00

BIAYA PERAWATAN
TBM 2002 UNIT KEBUN SIMPANG GAMBIR (KELAPA SAWIT) 20 Ha.

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	978/Dir/PDP/2003	12/31/03	2,725,780.00
2	Pebruari	65/Dir/PDP/2004	1/30/04	2,912,140.00
3	Maret	126/Dir/PDP/2004	2/27/04	1,879,720.00
4	April	235/Dir/PDP/2004	3/31/04	2,532,460.00
5	Mei	329/Dir/PDP/2004	4/30/04	3,427,240.00
6	Juni	383/Dir/PDP/2004	5/31/04	2,522,340.00
7	Juli	483/Dir/PDP/2004	6/30/04	2,532,460.00
8	Agustus	595/Dir/PDP/2004	7/30/04	3,044,680.00
9	September	665/Dir/PDP/2004	8/31/04	2,522,340.00
10	Oktober	779/Dir/PDP/2004	9/30/04	2,532,460.00
11	Nopember	859/Dir/PDP/2004	10/29/04	3,554,760.00
12	Desember	947/Dir/PDP/2004	11/30/04	2,012,280.00
Jumlah				32,198,660.00

BIAYA PERAWATAN
TBM 2002 UNIT KEBUN SIMPANG GAMBIR (KELAPA SAWIT) 90 Ha.

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	979/Dir/PDP/2003	12/31/03	14,544,180.00
2	Pebruari	61/Dir/PDP/2004	1/30/04	13,395,060.00
3	Maret	133/Dir/PDP/2004	2/27/04	8,592,750.00
4	April	233/Dir/PDP/2004	3/31/04	13,834,890.00
5	Mei	327/Dir/PDP/2004	4/30/04	15,609,150.00
6	Juni	388/Dir/PDP/2004	5/31/04	11,493,990.00
7	Juli	485/Dir/PDP/2004	6/30/04	11,539,530.00
8	Agustus	597/Dir/PDP/2004	7/30/04	14,001,030.00
9	September	668/Dir/PDP/2004	8/31/04	9,198,630.00
10	Oktober	763/Dir/PDP/2004	9/30/04	11,539,530.00
11	Nopember	857/Dir/PDP/2004	10/29/04	14,001,030.00
12	Desember	959/Dir/PDP/2004	11/30/04	9,198,630.00
Jumlah				146,948,400.00

BIAYA PERAWATAN
TBM 2002 UNIT KEBUN SIMPANG GAMBIR (KELAPA SAWIT) 50 Ha.

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	980/Dir/PDP/2003	12/31/03	6,814,450.00
2	Pebruari	62/Dir/PDP/2004	1/30/04	7,280,350.00
3	Maret	132/Dir/PDP/2004	2/27/04	4,699,300.00
4	April	234/Dir/PDP/2004	3/31/04	6,331,150.00
5	Mei	328/Dir/PDP/2004	4/30/04	8,568,100.00
6	Juni	382/Dir/PDP/2004	5/31/04	6,305,850.00
7	Juli	484/Dir/PDP/2004	6/30/04	6,331,150.00
8	Agustus	594/Dir/PDP/2004	7/30/04	7,611,700.00
9	September	666/Dir/PDP/2004	8/31/04	6,305,850.00
10	Oktober	780/Dir/PDP/2004	9/30/04	6,331,150.00
11	Nopember	858/Dir/PDP/2004	10/29/04	8,886,900.00
12	Desember	958/Dir/PDP/2004	11/30/04	5,030,650.00
Jumlah				80,496,600.00

BIAYA PERAWATAN
TBM 2003 UNIT KEBUN SIMPANG GAMBIR (KELAPA SAWIT) 30 Ha.

No	Bulan	SPK	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Januari	977/Dir/PDP/2003	12/31/03	5,294,760.00
2	Pebruari	64/Dir/PDP/2004	1/30/04	5,653,050.00
3	Maret	125/Dir/PDP/2004	2/27/04	4,561,710.00
4	April	236/Dir/PDP/2004	3/31/04	5,663,670.00
5	Mei	330/Dir/PDP/2004	4/30/04	5,974,740.00
6	Juni	385/Dir/PDP/2004	5/31/04	4,883,370.00
7	Juli	482/Dir/PDP/2004	6/30/04	5,663,670.00
8	Agustus	596/Dir/PDP/2004	7/30/04	5,974,740.00
9	September	667/Dir/PDP/2004	8/31/04	4,883,370.00
10	Oktober	778/Dir/PDP/2004	9/30/04	5,663,670.00
11	Nopember	860/Dir/PDP/2004	10/29/04	5,974,740.00
12	Desember	948/Dir/PDP/2004	11/30/04	4,883,370.00
Jumlah				65,074,860.00

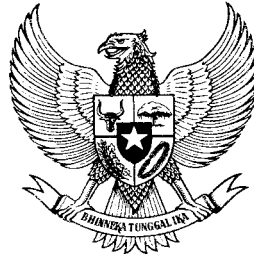
NO	Uraian	Tanggal	Nilai (Rp)
1	No. 821/DIR/PDP/2004 Pembuatan rumah karyawan semi permanen G-6	10/12/04	126,201,050.00
2	No. 937/DIR/PDP/2004 Pembuatan rumah karyawan semi permanen G-6	11/25/04	126,728,510.00
Jumlah			252,929,560.00

REKAPITULASI:

1	Biaya pemeliharaan TBM	389,283,870.00
2	Biaya babat gawangan	65,870,940.00
3	Pembuatan Sarana Karyawan	252,929,560.00
		708,084,370.00

Surat Perintah Kerja Pengadaan Pupuk Kepada Pihak II

No.	No. SPK	Tanggal	Nilai (Rp)	Penyerahan						Keterlambatan (hari)
				Seharusnya			Realisasi			
1	40/Dir/SPK/PDP/2004	1/29/04	136,690,000.00	1/29/04	s.d.	2/16/04	2/18/04	s.d.	2/21/04	05
2	106/Dir/SPK/PDP/2004	2/20/04	60,260,000.00	2/20/04	s.d.	3/9/04	3/5/04	s.d.	3/9/04	-
3	107/Dir/SPK/PDP/2004	2/20/04	266,668,000.00	2/20/04	s.d.	3/6/04	3/3/04	s.d.	3/13/04	-
				3/8/04	s.d.	3/23/04			3/13/04	-
4	118/Dir/SPK/PDP/2004	2/25/04	82,626,225.00	2/25/04	s.d.	3/20/04	3/31/04	s.d.	4/3/04	14
5	336/Dir/SPK/PDP/2004	5/5/04	352,624,500.00	5/5/04	s.d.	5/24/04	5/10/04	s.d.	5/21/04	-
6	426/Dir/SPK/PDP/2004	6/8/04	201,465,000.00	6/8/04	s.d.	6/30/04	7/9/04	s.d.	8/4/04	35
7	427/Dir/SPK/PDP/2004	6/8/04	251,907,000.00	6/8/04	s.d.	6/30/04	6/17/04	s.d.	7/1/04	01
8	515/Dir/SPK/PDP/2004	7/7/04	202,254,000.00	7/7/04	s.d.	7/21/04	7/16/04	s.d.	7/19/04	-
9	549/Dir/SPK/PDP/2004	7/21/04	116,298,000.00	7/21/04	s.d.	8/14/04			7/23/04	-
10	550/Dir/SPK/PDP/2004	7/21/04	17,710,000.00	7/21/04	s.d.	8/14/04	8/21/04	s.d.	9/6/04	23
11	585/Dir/SPK/PDP/2004	7/30/04	150,480,000.00	8/18/04	s.d.	9/6/04	10/14/04	s.d.	10/18/04	42
12	688/Dir/SPK/PDP/2004	8/31/04	9,756,600.00	8/31/04	s.d.	9/18/04	9/22/04	s.d.	9/25/04	7
13	689/Dir/SPK/PDP/2004	8/31/04	270,625,000.00	8/31/04	s.d.	9/22/04	9/7/04	s.d.	9/24/04	02
14	742/Dir/SPK/PDP/2004	9/24/04	434,596,250.00	9/24/04	s.d.	10/16/04	10/13/04	s.d.	10/16/04	-
15	894/Dir/SPK/PDP/2004	11/5/04	104,150,000.00	11/5/04	s.d.	12/4/04	11/11/04	s.d.	11/22/04	-
16	896/Dir/SPK/PDP/2004	11/5/04	7,258,800.00	11/5/04	s.d.	11/30/04	11/12/04	s.d.	12/9/04	09
17	901/Dir/SPK/PDP/2004	11/8/04	8,386,000.00	11/8/04	s.d.	12/11/04	11/25/04	s.d.	12/8/04	-
18	902/Dir/SPK/PDP/2004	11/8/04	32,354,400.00	11/8/04	s.d.	12/15/04	1/8/05	s.d.	1/26/05	42
19	1014/Dir/SPK/PDP/2004	12/15/04	247,895,000.00	12/15/04	s.d.	12/30/04	12/22/04	s.d.	12/23/04	-
20	1022/Dir/SPK/PDP/2004	12/17/04	9,800,000.00	12/17/04	s.d.	1/8/05			1/3/05	-
21	1026/Dir/SPK/PDP/2004	12/20/04	62,560,000.00	12/20/04	s.d.	1/19/05	1/15/05	s.d.	1/17/05	-
J u m l a h			3,026,364,775.00							



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA
TAHUN BUKU 2004**

PADA

**PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

DI

MEDAN

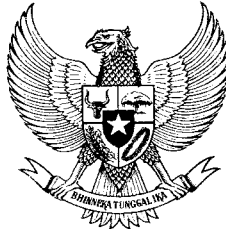
**PERWAKILAN I BPK-RI
DI MEDAN**

Nomor : /S/XIV.1/ /2005

Tanggal :

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I SIMPULAN	1
1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	1
2. Tingkat Keberhasilan Perusahaan	2
3. Perkembangan Usaha	2
4. Pemahaman atas Satuan Pengawas Intern (SPI)	4
5. Dana Pembinaan Yayasan dan Koperasi	4
6. Aspek Strategis	4
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI	6
1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	6
2. Tingkat Keberhasilan Perusahaan	8
3. Perkembangan Usaha PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	13
4. Pemahaman atas Satuan Pengawas Intern (SPI)	21
5. Dana Pembinaan Yayasan dan Koperasi	21
6. Aspek Strategis	22



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Imam Bonjol No. 22 Telp. (061) 4519039 Fax (061) 4538140 Medan 20152

BAB I SIMPULAN

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

- a. Penyusunan RKAP tahun 2004 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SK Gubernur Sumatera Utara No. 539/2674/K/Tahun 2003.
- b. Realisasi pendapatan usaha tahun 2004 sebesar Rp47.563.853.015,00 atau sebesar 97,12% dari anggaran sebesar Rp48.976.260.570,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun 2003 sebesar Rp43.761.718.805,00 maka nilai pada tahun 2004 meningkat sebesar Rp3.802.134.210,00 atau mengalami peningkatan sebesar 8,69%. Kondisi itu terjadi karena kenaikan produksi dan harga jual karet dan sawit.
- c. Realisasi beban tahun 2004 sebesar Rp35.156.968.500,00 atau sebesar 82,99% dari anggaran sebesar Rp42.362.176.836,00. Apabila dibandingkan dengan beban tahun 2003 sebesar Rp34.151.398.724,00 maka nilai pada tahun 2004 meningkat sebesar Rp1.005.569.776,00 atau sebesar 2,94%. Kondisi itu terjadi antara lain karena kenaikan harga produksi.
- d. Realisasi investasi tahun 2004 sebesar Rp23.691.104.980,00 atau sebesar 89,12% dari anggaran sebesar Rp26.582.197.176,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2003 sebesar Rp6.115.961.809,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp17.575.143.171,00 atau 287,37%. Kenaikan itu terjadi karena investasi rutin maupun non rutin tahun 2004 di antaranya untuk pelaksanaan pekerjaan rehab satu ruangan, pengadaan tanah serta pagar beton di kantor pusat yang dianggarkan pada tahun 2003 namun direalisasikan tahun 2004 dan pembuatan PMKS di Kebun Tanjung Kasau.

- e. Produksi sawit tahun 2004 sebesar 46.646.549 kg atau sebesar 90,89% dari anggaran sebesar 51.323.612 kg, sedangkan produksi karet tahun 2004 sebesar 2.051.907 kg atau sebesar 89,33% dari anggaran sebesar 2.296.986 kg. Apabila dibandingkan dengan produksi kelapa sawit dan karet pada tahun 2003 yang masing-masing sebesar 39.292.628 kg dan sebesar 2.365.468 kg, maka terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit sebesar 7.353.921 kg atau 18,72% dan untuk produksi karet terjadi penurunan sebesar 313.561 kg atau 13,26%. Peningkatan produksi kelapa sawit terjadi karena pada tahun 2004 tanaman yang belum menghasilkan telah menjadi tanaman menghasilkan dan penurunan produksi karet terjadi karena adanya konversi dari tanaman karet ke tanaman kelapa sawit.
- f. Penjualan sawit tahun 2004 sebesar 46.721.039 kg atau sebesar 91,03% dari anggaran sebesar 51.323.612 kg, sedangkan untuk penjualan karet tahun 2004 sebesar 2.054.904 kg atau sebesar 89,46% dari anggaran sebesar 2.296.986 kg. Apabila dibandingkan dengan penjualan kelapa sawit dan karet pada tahun 2003 yang masing-masing sebesar 39.223.007 kg dan 2.387.339 kg, maka terjadi peningkatan jumlah penjualan kelapa sawit sebesar 7.498.032 kg atau sebesar 19,12% dan terjadi penurunan jumlah penjualan karet sebesar 332.435 kg atau 13,92%. Peningkatan penjualan kelapa sawit terjadi karena peningkatan produksi pada tahun 2004 dan penurunan penjualan karet terjadi karena adanya penurunan produksi karet.

2. Tingkat Keberhasilan Perusahaan

Sesuai dengan SK Menteri BUMN No. KEP.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, maka nilai kinerja Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (PDPPSU) tahun 2004 ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi adalah 84,5 dan tergolong sehat dengan kategori "AA", dengan rincian aspek keuangan 68, aspek operasional 13,5 dan aspek administrasi 3. Perhitungan tingkat kesehatan perusahaan selengkapnya pada Bab II Uraian Hasil Evaluasi.

3. Perkembangan Usaha

- a. Asset perusahaan tahun 2004 sebesar Rp65.763.615.841,00. Apabila dibandingkan dengan asset pada tahun 2003 sebesar Rp40.775.323.033,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp24.988.292.808,00 atau sebesar 61,28%. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya pengadaan-pengadaan baru sebagai akibat meningkatnya jumlah pendapatan dan

penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan.

- b. Laba operasi perusahaan tahun 2004 sebesar Rp13.148.914.666,00. Apabila dibandingkan dengan laba operasi tahun 2003 sebesar Rp10.509.937.326,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp2.638.977.340,00 atau 25,11%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan produksi dan harga jual.
- c. Arus kas operasi, investasi dan pendanaan perusahaan pada tahun 2004 meningkat dibandingkan dengan tahun 2003. Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2004 adalah sebesar Rp8.691.872.371,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp4.390.702.083,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp4.301.170.288,00 atau sebesar 97,96%. Arus kas untuk aktivitas investasi pada tahun 2004 sebesar Rp21.879.912.391,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp4.675.823.933,00 maka terjadi peningkatan arus kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp17.204.088.458,00 atau sebesar 367,94%. Arus kas untuk aktivitas pendanaan tahun 2004 sebesar Rp15.351.593.956,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp2.189.244.972,00 mengalami peningkatan sebesar Rp13.162.348.984,00 atau sebesar 601,23%. Saldo kas akhir pada tahun 2004 sebesar Rp4.659.326.948,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar Rp2.495.773.012,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp2.163.553.936,00 atau sebesar 86,69%.
- d. Ekuitas perusahaan pada tahun 2004 sebesar Rp30.496.915.152,00. Apabila dibandingkan dengan ekuitas tahun 2003 sebesar Rp22.766.417.677,00, maka terjadi peningkatan ekuitas sebesar Rp7.730.497.475,00 atau sebesar 33,95%. Kenaikan tersebut terjadi karena peningkatan nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari sebesar Rp10.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp14.000.000.000,00 atau sebesar 40% dan kenaikan laba bersih perusahaan dari sebesar Rp7.400.914.392,00 menjadi sebesar Rp8.472.892.074,00 atau sebesar 14,48%.
- e. Rasio keuangan tahun 2004 yaitu rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas berfluktuasi apabila dibandingkan dengan tahun 2003. Rasio likuiditas meningkat sedangkan rasio solvabilitas dan rentabilitas menurun.

- f. Produksi kelapa sawit dari tahun 2000 s.d 2004 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 28,02%. Produksi karet hanya meningkat pada tahun 2001 sebesar 6,58%, sedangkan pada tahun 2002 s.d 2004 mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,40%. Untuk penjualan kelapa sawit juga mengalami peningkatan dari tahun 2000 s.d 2004 rata-rata sebesar 28,07%, dan penjualan karet hanya meningkat pada tahun 2001 sebesar 6,65%, sedangkan pada tahun 2002 s.d 2004 mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,20%. Selain itu, realisasi penjualan kelapa sawit tahun 2004 lebih besar dari produksi kelapa sawit tahun 2004. Hal ini karena realisasi penjualan tersebut termasuk penjualan sisa produksi per 31 Desember tahun 2003. Hal yang sama terjadi terhadap realisasi penjualan karet tahun 2003 dan 2004. Dengan demikian perkembangan produksi dan penjualan sawit secara umum mengalami kenaikan. Sedangkan produksi dan penjualan karet mengalami penurunan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya peralihan tanaman produksi (konversi) dari tanaman karet menjadi tanaman sawit.
- g. Berdasarkan analisa SWOT, kondisi internal PDPPSU secara keseluruhan cukup baik, demikian pula dengan kondisi eksternal yang cenderung positif bagi perkembangan perusahaan.

4. Pemahaman Atas Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pelaksanaan tugas SPI yang meliputi pengawasan umum dan pengawasan teknik secara umum telah dilaksanakan, namun belum seluruhnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

5. Dana Pembinaan Yayasan dan Koperasi

Pada tahun 2004 ini PDPPSU telah membantu perkembangan Yayasan PDPPSU yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk tingkat Taman Kanak-Kanak dan Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama. Selain itu PDPPSU juga telah memberikan pinjaman kepada koperasi pegawai PDPPSU untuk modal kerja dan pengembangan koperasi.

6. Aspek Strategis

Secara umum perusahaan telah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut antara lain terlihat dari pemberian

kesempatan kepada seluruh karyawan perusahaan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh PDPPSU sendiri maupun oleh institusi pendidikan dalam negeri.

PEMIMPIN TIM,

JOSEPH SINAGA, SE.AK
Akuntan Reg. Neg. D-12142

BAB II URAIAN HASIL EVALUASI

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

a. Penyusunan RKAP

RKAP PD Perkebunan untuk tahun buku 2004 disusun oleh Direksi dan staf perusahaan berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan usulan dari setiap Kepala Bagian dan Unit Kebun. Setelah konsep RKAP tersebut disusun dan disetujui oleh Direksi selanjutnya diajukan kepada Badan Pengawas untuk diteliti bersama Direksi dan staf. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Badan Pengawas, RKAP PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan SK No. 539/2674/K/Tahun 2003 tanggal 23 Desember 2003. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa penyusunan RKAP cukup realistis dan mekanisme penyusunan anggaran telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan RKAP

Perbandingan realisasi dengan anggaran tahun 2004 dan realisasi tahun 2003 yang meliputi pendapatan, biaya, investasi, dan produksi adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan

Perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran tahun 2004 dan realisasi tahun 2003 adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi 2004	Anggaran 2004	Realisasi 2003	% Realisasi 2004 terhadap	
				Angg 2004	Real 2003
Pendapatan Operasional :					
Pendapatan Sawit	28.357.913,01	31.887.334,08	24.912.128,52	88,93	113,83
Pendapatan Karet	19.205.940,00	17.088.926,49	18.849.590,28	112,39	101,89
Jumlah Pendapatan Ops.	47.563.853,01	48.976.260,57	43.761.718,80	97,12	108,69
Pendapatan Non Ops.	270.695,34	233.826,00	1.090.218,94	115,77	24,83
Jumlah Pendapatan	47.834.548,35	49.210.086,57	44.851.937,74	97,20	106,65

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan perusahaan (termasuk pendapatan non operasi) mencapai 97,20% dari anggaran dan apabila dibandingkan dengan tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 6,65%, sedangkan pendapatan operasional mencapai 97,12% dari anggaran dan apabila dibandingkan dengan tahun

2003 meningkat sebesar 8,69%. Kenaikan ini terjadi karena peningkatan penerimaan dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

2) Beban

Perbandingan realisasi beban dengan anggaran tahun 2004 dan realisasi tahun 2003 adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi 2004	Anggaran 2004	Realisasi 2003	% Realisasi 2004 terhadap	
				Angg 2004	Real 2003
Beban Langsung	20.144.638,51	27.094.013,27	20.753.642,13	74,35	97,07
Beban Tidak Langsung	12.477.717,43	12.813.585,23	10.990.352,40	97,38	113,53
Beban Lain-lain	2.534.612,56	2.454.578,34	2.407.404,19	103,26	105,28
Jumlah Pendapatan	35.156.968,50	42.362.176,84	34.151.398,72	82,99	102,94

Dari tabel di atas terlihat bahwa beban tahun 2004 lebih kecil dari anggaran yaitu sebesar 82,99% dan apabila dibandingkan dengan tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 2,94%.

3) Investasi

Perbandingan realisasi investasi dengan anggaran tahun 2004 dan realisasi tahun 2003 adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Realisasi 2004	Anggaran 2004	Realisasi 2003	% Realisasi 2004 terhadap	
				Angg 2004	Real 2003
Investasi Rutin	5.731.943,86	7.321.757,28	4.524.606,80	78,29	126,68
Investasi Non Rutin	1.662.947,87	3.171.910,00	1.251.780,01	52,43	132,85
Investasi PKS	16.296.213,25	16.088.529,90	339.575,00	101,29	4.799,00
Jumlah	23.691.104,98	26.582.197,18	6.115.961,81	89,12	387,37

Dari tabel di atas terlihat bahwa tahun 2004 realisasi investasi tidak melebihi anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar 89,12% dan bila dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2003 maka pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 287,37%.

4) Produksi dan Penjualan Sawit dan Karet

Perbandingan realisasi produksi dan penjualan sawit dan karet dengan anggaran tahun 2004 dan realisasi tahun 2003 adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan kg)

Uraian	Realisasi 2004 (kg)	Anggaran 2004 (kg)	Realisasi 2003 (kg)	% Realisasi 2004 terhadap	
				Angg 2004	Real 2003
Produksi					
- Karet	2.052	2.297	2.365	89,33	86,77
- Kelapa Sawit	46.647	51.324	39.292	90,89	118,72
Penjualan					
- Karet	2.055	2.297	2.387	89,46	86,09
- Kelapa Sawit	46.721	51.324	39.223	91,03	119,12

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa:

- a) Produksi karet pada tahun 2004 di bawah anggaran yaitu sebesar 2.052 kg atau 89,33% dari anggaran sebesar 2.297 kg. Produksi kelapa sawit pada tahun 2004 juga di bawah anggaran yaitu sebesar 46.647 kg atau 90,89% dari anggaran sebesar 51.324 kg. Kondisi tersebut antara lain disebabkan cuaca atau curah hujan yang cukup banyak dalam tahun 2004 yang mempengaruhi produktifitas. Meskipun demikian produksi kelapa sawit apabila dibandingkan dengan tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 7.355 kg atau sebesar 18,72%.
- b) Penjualan karet pada tahun 2004 di bawah anggaran yaitu sebesar 2.055 kg atau sebesar 89,46% dari anggaran sebesar 2.297 kg. Penjualan kelapa sawit pada tahun 2004 juga di bawah anggaran yaitu sebesar 46.721 kg atau sebesar 91,03% dari anggaran sebesar 51.324 kg. Kondisi tersebut antara lain disebabkan tingkat produksi yang tidak mencapai target yang ditetapkan dari anggaran.

2. Tingkat Keberhasilan Perusahaan

Sesuai dengan SK Menteri BUMN No. KEP.100/MBU/2002 tanggal 4 Juli 2002 tentang “**Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN**”, tingkat keberhasilan PDPPSU Tahun Buku 2004 dihitung sebagai berikut.

a. Aspek Keuangan

No	INDIKATOR	RUMUS	TAHUN 2004	SCORE
1.	Return on Equity	$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$	$\frac{8.458.565.874}{22.024.023.078} \times 100\% = 38,41\%$	20
2.	Return On Investment (ROI)	$\frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$	$\frac{15.805.300.463}{49.467.402.592} \times 100\% = 31,95\%$	15
3.	Cash Ratio	$\frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Inv. Jk. Pendek}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	$\frac{8.909.326.948}{7.076.875.460} \times 100\% = 125,89\%$	5
4.	Current Ratio	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$	$\frac{14.528.806.790}{7.076.875.460} \times 100\% = 205,30\%$	5
5.	Collection Period	$\frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$	$\frac{925.031.616}{47.563.853.015} \times 365 \text{ hari} = 7,10$	5
6.	Perputaran Persediaan	$\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$	$\frac{480.621.233}{47.563.853.015} \times 365 \text{ hari} = 3,69$	5
7.	Total Asset Turn Over (TATO)	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$	$\frac{47.834.548.357}{49.467.402.592} \times 100\% = 96,70\%$	4
8.	Ratio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset	$\frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	$\frac{30.496.915.152}{65.763.615.841} \times 100\% = 46,37\%$	9
JUMLAH				68

b. Aspek Operasional

NO	INDIKATOR	REALISASI	RKAP	+ (-)	%	NILAI	SCORE
1.	Produktivitas (kg/Ha)						
	- Kelapa Sawit	16.889,72	18.583,19	(1.693,47)	(9,11)	80%	1,2
	- Karet	1.555,08	1.740,81	(185,74)	(10,67)	80%	1,2
2.	Produktivitas Hasil Jadi (kg)						
	- Kelapa Sawit	46.646.549,00	51.323.612,00	(4.677.063,00)	(9,11)	80%	1,2
	- Karet	2.051.907,00	2.296.986,00	(245.079,00)	(10,67)	80%	1,2
3.	Biaya Tanaman (Rp)						
	- Kelapa Sawit	9.941.921.306,00	15.749.113.189,00	(5.807.191.883,00)	(36,87)	100%	1,5
	- Karet	9.694.019.409,00	10.759.795.919,00	(1.065.776.510,00)	(9,91)	100%	1,5
4.	Biaya Pengolahan (Rp)						
	- Kelapa Sawit	-	-	-	-		
	- Karet	508.697.792,00	585.104.161,00	(76.406.369,00)	(13,06)	100%	3
5.	Biaya Administrasi (Rp)						
	- Kelapa Sawit	4.341.323.636,00	3.419.277.754,00	922.045.882,00	26,97	80%	1,2
	- Karet	3.375.597.553,00	3.860.692.702,00	(485.095.149,00)	(12,56)	100%	1,5
							13,5

Sesuai dengan klasifikasi umum yang diatur dalam SK Menteri BUMN No. KEP.100/MBU/2002 tanggal 4 Juli 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, maka nilai kinerja PDPPSU tahun 2004 ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi adalah 84,5 dan tergolong sehat dengan kategori "AA", dengan rincian aspek keuangan 68, aspek operasional 13,5 dan aspek administrasi 3.

No.	ASPEK	NILAI
1.	Keuangan	68
2.	Operasional	13,5
3.	Administrasi	3
	JUMLAH	84,5

Angka penilaian dan klasifikasi umum pemantauan Kinerja Keuangan terhadap tingkat kesehatan PDPPSU sebagai berikut.

a. SEHAT, yang terdiri dari:

AAA apabila Total Score (TS) lebih besar dari 95

AA apabila $80 < TS \leq 95$

A apabila $65 < TS \leq 80$

b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari:

BBB apabila $50 < TS \leq 65$

BB apabila $40 < TS \leq 50$

B apabila $30 < TS \leq 40$

c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:

CCC apabila $20 < TS \leq 30$

CC apabila $10 < TS \leq 20$

C apabila $TS \leq 10$

3. Perkembangan Usaha PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

a. Perkembangan Posisi Keuangan

Perkembangan posisi keuangan (Neraca) per 31 Desember dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	2000	2001	2002	2003	2004
<i>AKTIVA</i>					
- Aktiva lancar	2.658.017	4.549.005	5.868.059	10.461.510	14.528.807
- Aktiva tetap (net)	17.945.845	20.520.735	24.326.667	28.371.283	33.345.075
- Aktv tdk berwdj	27.729	25.028	22.327	19.626	96.074
- Aktiva lain-lain	2.390.019	2.482.273	2.401.754	1.922.904	17.793.660
TOTAL AKTIVA	23.021.610	27.577.041	32.618.807	40.775.323	65.763.616
<i>PASIVA</i>					
- Hutang lancar	1.396.720	3.695.850	7.346.497	5.913.069	7.076.876
- Hutang jk. Pnjg	4.234.045	6.490.433	9.579.085	12.095.837	24.640.233
- Kewajiban Lain-lain	-	-	-	-	3.549.592
- Ekuitas	17.390.845	17.390.758	15.693.225	22.766.417	30.496.915
TOTAL PASIVA	23.021.610	27.577.041	32.618.807	40.775.323	65.763.616

Perkembangan posisi keuangan dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan masing-masing-masing sebesar 19,79%, 18,28%, 25,01% dan 61,28% atau rata-rata sebesar 31,09% dari total asset tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya pembelian aktiva tetap, perluasan tambahan areal tanaman, dan pembangunan pabrik PKS. Sedangkan peningkatan pasiva perusahaan terjadi karena adanya penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp4.000.000.000,00 serta keuntungan yang dihasilkan selama tahun 2004.

b. Perkembangan Laba-Rugi Perusahaan

Realisasi perkembangan hasil Usaha PDPPSU dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	2000	2001	2002	2003	2004
Pendapatan Usaha	16.736.197	21.983.286	33.353.813	43.761.718	47.563.853
Biaya Langsung Usaha	(12.592.622)	(16.676.361)	(22.959.754)	(29.252.994)	(29.544.403)
Biaya Adm. Umum	(1.300.975)	(1.716.329)	(2.766.480)	(3.998.787)	(4.870.535)
Laba (Rugi) Usaha	2.842.600	3.590.596	7.627.579	10.509.937	13.148.915
Pendapatan Lain-lain	256.835	201.781	547.496	1.090.218	270.695
Biaya Lain-lain	(143.830)	(163.258)	(677.274)	(946.595)	(774.098)
Laba (Rugi) sbllm Pajak	2.955.605	3.629.119	7.497.801	10.653.560	12.645.512
Pajak Penghasilan Badan	(1.038.874)	(1.298.794)	(2.525.904)	(3.252.646)	(4.172.620)
Laba (Rugi) setelah Pajak	1.916.731	2.330.325	4.971.897	7.400.914	8.472.892

Dalam lima tahun terakhir laba usaha terus mengalami peningkatan masing-masing-masing sebesar 26,31%, 112,43%, 37,79% dan 25,11% atau rata-rata sebesar 50,41%. Laba sebelum pajak dalam kurun lima tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan masing-masing sebesar 22,79%, 106,60%, 42,09% dan 18,70% atau rata-rata sebesar 47,55%. Peningkatan laba usaha dan laba sebelum pajak terjadi karena adanya kenaikan produksi dan harga jual.

c. Perkembangan Arus Kas

Perkembangan arus kas dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	2000	2001	2002	2003	2004
AKTIVA					
1. Kas bersih dari aktivitas operasi	5.137.729	4.032.998	8.757.853	4.390.702	8.691.872
2. Kas bersih dari aktivitas investasi	(2.918.664)	(3.798.702)	(5.030.197)	(4.675.823)	(21.879.912)
3. Kas bersih dari pendanaan	(2.756.814)	(74.024)	(3.640.778)	2.189.244	15.351.594
4. Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(537.749)	160.272	86.878	1.904.123	2.163.554
5. Saldo awal	882.248	344.499	504.771	591.650	2.495.773
6. Saldo akhir	344.499	504.771	591.649	2.495.773	4.659.327

Dari tabel di atas diketahui:

- 1) Kas yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasi dalam lima tahun terakhir

berfluktuasi tetapi selalu merupakan arus kas positif. Pada tahun 2001 dan 2003 mengalami penurunan masing-masing sebesar 21,50% dan 49,87% sedangkan tahun 2002 dan 2004 meningkat sebesar 117,15% dan 97,96%.

- 2) Kas yang digunakan perusahaan untuk aktivitas investasi dalam lima tahun terakhir berfluktuasi tetapi selalu merupakan arus kas negatif. Pada tahun 2000 s.d 2002 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 30,15% dan 32,42% atau rata-rata sebesar 31,29%, tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 7,04%, dan tahun 2004 meningkat sebesar 367,94%.
- 3) Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan dalam lima tahun terakhir juga berfluktuasi dengan arus kas negatif dari tahun 2000 s.d 2002 dan arus kas positif dari tahun 2003 s.d 2004. Pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 97,31%, sedangkan pada tahun 2002 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 4.818,38%. Pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 160,13% dan tahun 2004 meningkat sebesar 601,23%.
- 4) Saldo kas akhir dalam lima tahun terakhir terus meningkat masing-masing sebesar 46,52%, 17,21%, 321,83% dan 86,69% atau rata-rata sebesar 118,06%. Peningkatan arus kas ini terjadi karena adanya kenaikan penerimaan operasional.

d. Perkembangan Ekuitas

Perkembangan Ekuitas dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)					
URAIAN	2000	2001	2002	2003	2004
1. Kekayaan Pemda yang Dipisahkan	7.692.817	8.000.000	8.000.000	10.000.000	14.000.000
2. Cadangan Umum	6.189.917	5.923.496	1.584.391	4.228.566	6.887.086
3. Penilaian Kembali Aktiva Tetap	1.136.937	1.136.937	1.136.937	1.136.937	1.136.937
4. Laba Tahun Berjalan	1.916.731	2.330.325	4.971.897	7.400.914	8.472.892
5. Cad. Setoran Modal	454.443	-	-	-	-
JUMLAH	17.390.845	17.390.758	15.693.225	22.766.417	30.496.915

Dalam lima tahun terakhir ekuitas perusahaan mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2000 s.d 2002 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,00% dan 9,76% atau rata-rata sebesar 4,88%, sedangkan pada tahun 2003 dan 2004 mengalami peningkatan sebesar 45,07% dan 33,95% atau rata-rata sebesar 39,51%. Kenaikan tersebut

disebabkan adanya Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp4.000.000.000,00 dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam tahun buku 2004 sebesar Rp8.472.892.074,00.

e. Perkembangan Ratio Keuangan

Perkembangan Ratio Keuangan Perusahaan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut.

URAIAN	2000	2001	2002	2003	2004
LIKUIDITAS					
Cash Ratio (%)	24,66	13,65	25,75	76,03	125,89
Current Ratio (%)	190,30	123,08	79,88	176,92	205,30
Quick Ratio (%)	55,08	32,09	36,47	119,01	139,65
SOLVABILITAS					
Ratio Kewajiban thd Ekuitas (%)	32,38	58,57	107,85	79,10	115,64
Ratio Aktiva thd Hutang (%)	408,85	270,73	192,72	226,41	186,48
RENTABILITAS					
ROI (%)	18,73	19,16	29,57	31,24	31,95
ROE (%)	12,08	15,47	46,37	48,37	38,41

Dalam kurun waktu 2000-2004 rasio keuangan menunjukkan perkembangan sebagai berikut.

- 1) Ratio Likuiditas perusahaan selama 5 tahun terakhir berfluktuatif. Cash ratio pada tahun 2000 sebesar 24,66% menurun pada tahun 2001 menjadi sebesar 13,65%, tetapi kemudian terus meningkat sampai sebesar 125,89% pada tahun 2004. Hal ini berarti bahwa untuk Rp1,00 nilai kewajiban lancar dapat dijamin dengan Rp1,26 ($125,89\% \times Rp1,00$) kas perusahaan. Quick ratio dan current ratio juga cenderung menurun, namun untuk tahun 2004 perusahaan masih mampu membayar kewajiban lancar dengan aktiva lancar perusahaan. Untuk Rp1,00 nilai hutang lancar dapat dijamin dengan Rp2,05 ($205,30\% \times Rp1,00$) aktiva lancar perusahaan.
- 2) Ratio Solvabilitas menunjukkan hal yang positif. Hal ini dapat dilihat dari rasio aktiva terhadap hutang tahun 2004 sebesar 186,48% yang berarti bahwa perusahaan mampu membayar setiap Rp1,00 dari total hutang dengan Rp1,86 ($186,48\% \times Rp1,00$) dari total aktiva perusahaan.
- 3) Rasio Rentabilitas juga menunjukkan hal yang positif, dalam empat tahun terakhir kemampuan perusahaan untuk mengembalikan dan memperoleh keuntungan dari investasi yang ditanamkan (ROI) mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan tersebut adalah sebesar 16,14% dengan persentase kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2002

yaitu sebesar 54,33% $((29,57-19,16)/19,16)$ dan terendah pada tahun 2004 sebesar 2,27% $((31,95-31,24)/31,24)$.

f. Perkembangan Operasi Pokok

Perkembangan produksi dan penjualan sawit serta karet dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan kg)

URAIAN	2000	2001	2002	2003	2004
Produksi					
- Sawit	17.815	27.117	34.603	39.292	46.647
- Karet	2.433	2.593	2.525	2.365	2.052
Penjualan					
- Sawit	17.815	27.117	34.577	39.223	46.721
- Karet	2.421	2.582	2.481	2.387	2.055

Dalam lima tahun terakhir produksi sawit mengalami peningkatan rata-rata sebesar 28,02% dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 52,21% dan terendah terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 13,55%. Sedangkan produksi karet secara umum mengalami penurunan sebesar 3,90% dengan persentase tertinggi tahun 2001 sebesar 6,58% dan tahun 2004 mengalami penurunan produksi sebesar 13,23%. Demikian pula dengan tingkat penjualan sawit mengalami kenaikan rata-rata sebesar 28,07% dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2001 sebesar 52,21% dan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 13,44%. Sedangkan tingkat penjualan karet selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 6,65%, sedangkan pada tahun 2002 s.d 2004 mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,91%, 3,79% dan 13,91% atau rata-rata sebesar 7,20%. Realisasi penjualan kelapa sawit tahun 2004 lebih besar dari produksi kelapa sawit tahun 2004 karena realisasi penjualan tahun 2004 termasuk di dalamnya penjualan sisa produksi per 31 Desember tahun 2003. Sama halnya dengan realisasi penjualan karet tahun 2003 dan 2004. Dengan demikian perkembangan produksi dan penjualan sawit secara umum mengalami kenaikan. Sedangkan produksi dan penjualan karet mengalami penurunan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya peralihan tanaman produksi (konversi) dari tanaman karet menjadi tanaman sawit.

g. Analisa SWOT

Analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah analisa yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki dan dihadapi oleh perusahaan. Analisa ini untuk menetapkan posisi Perusahaan (PDPPSU) terhadap dunia usaha serta menetapkan strategi pemasaran dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

1) Analisis Internal PD Pekebunan Provinsi Sumatera Utara

Kondisi internal PD Perkebunan meliputi aspek administrasi, operasional dan keuangan. Kekuatan kondisi internal adalah kemampuan dalam menghilangkan/meminimalkan berbagai hambatan yang dapat mengganggu perkembangan perusahaan, sedangkan kelemahan adalah faktor-faktor yang ada dalam perusahaan yang memberikan dampak terhadap terhambatnya upaya perusahaan mencapai sasaran yang ditetapkan, sebagai berikut.

a) Kekuatan

(1) Pemasaran

- Lokasi kebun/unit berada di wilayah sentral produksi karet dan kelapa sawit sehingga memudahkan penjualan produksi.
- Komoditi yang terus menerus dibutuhkan, baik untuk pasaran lokal dan luar negeri (pasokan di pasar terbatas).
- Harga jual produksi yang cenderung membaik dari tahun ke tahun.
- Potensi tanaman yang terus menerus meningkat dilihat dari jumlah tanaman muda lebih besar dibandingkan tanaman tua.
- Kredibilitas perusahaan dengan nilai AA.

(2) Pengembangan

- Berkemampuan untuk melaksanakan kegiatan konversi dan replanting yang dilakukan di unit Simpang Gambir, Patiluban dan Tanjung Kasau sesuai umur tanaman dan luas pengembangan.
- Peningkatan jumlah produksi tanaman kelapa sawit sesuai potensi tanaman.
- Penggunaan bibit unggul kualitas terbaik, klon dan varietas superior sebagai bahan tanaman.
- Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS).

(3) Keuangan

- Kepercayaan dari perbankan dengan memperoleh fasilitas kredit.

- Penerimaan hasil penjualan yang lancar dan teratur setiap bulannya.
- Efisiensi yang tetap diperhatikan pada pos-pos pengeluaran.

(4) Sumber Daya Manusia

- Pengalaman dalam mengelola dan membangun perkebunan.
- Usia pegawai yang rata-rata masih muda.
- Pelatihan dan pendidikan yang terus dilakukan (Pusat Penelitian/Lembaga Pendidikan Perkebunan).
- Kesejahteraan karyawan yang terus ditingkatkan sesuai normatif Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Swasta (BKS-PPS).
- Budaya perbaikan yang terus menerus berdasarkan prinsip efektif dan efisien.

b) Kelemahan Perusahaan

(1) Pemasaran

- Nilai tambah terhadap harga jual TBS belum dapat ditingkatkan karena masih dalam bentuk bahan dasar TBS.
- Harga jual produksi yang tidak dapat dikuasai karena bergantung pada perkembangan harga pasar.

(2) Keuangan

- Sumber keuangan yang terbatas hanya dari hasil penjualan produksi.
- Sistem informasi keuangan sebagian besar masih dilaksanakan secara manual.

(3) Sumber Daya Manusia

- Sumber daya manusia kurang memadai terutama dalam bidang teknis dan manajerial. Sebagian karyawan hanya tamatan SLTA atau yang lebih rendah untuk level mandor ke bawah.

(4) Keamanan

- Masih terdapat pencurian buah.
- Masih terdapat gangguan hama hewan liar pada kebun Simpang Gambir dan Patiluban.

2) Analisis Eksternal PD Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (PDPPSU)

Kondisi eksternal adalah kondisi yang terjadi di luar pengendalian PDPPSU. Pengaruh kondisi eksternal berhubungan dengan perkembangan PDPPSU, visi, misi dan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, yaitu:

a) Visi

Menjadi salah satu Perusahaan Perkebunan terbaik yang mampu berkompetisi serta menjadi andalan masyarakat Sumatera Utara dalam meningkatkan perekonomian dan Pendapatan Daerah.

b) Misi dan Strategi:

- (1) Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melalui pencapaian produksi maksimal dengan kondisi keuangan yang tetap likuid dan sehat.
- (2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia dan produktifitas serta kesejahteraan pegawai.
- (3) Merubah bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Terbatas.
- (4) Mengembangkan Sistem Informasi dalam mendukung administrasi dan strategi penjualan.

Dari kondisi eksternal tersebut dijumpai indikator berupa peluang dan ancaman sebagai berikut.

a) Peluang

- Komoditi yang dikelola merupakan komoditi yang terus dibutuhkan pasar.
- Perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Kegiatan pengembangan terus berlangsung seperti kegiatan pembukaan areal, penanaman areal, dan konversi dari tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit serta upaya penambahan areal.
- Pengembangan usaha dari usaha perkebunan ke arah industri pengolahan kelapa sawit sangat memungkinkan melihat proyeksi luas dan produksi yang dimiliki saat ini.
- Kepercayaan perbankan mendukung pengembangan dan peningkatan usaha.
- Komposisi luas areal tanaman menghasilkan terus bertambah dan angka produksi terus meningkat.

b) Ancaman

- Harga pasar komoditi karet dan kelapa sawit yang berfluktuasi.
- Pencurian buah oleh oknum-oknum dari luar lingkungan yang masih harus terus diwaspadai.

- Adanya kelompok masyarakat/oknum tertentu yang mengganggu keberadaan areal dengan cara mengklaim areal milik pribadi atau warisan adat.

Dari kondisi di atas disimpulkan dampak lingkungan eksternal cukup besar, baik peluang maupun ancaman.

4. Pemahaman Atas Satuan Pengawas Intern (SPI)

Hasil pemeriksaan mengenai Satuan Pengawas Intern PD Perkebunan sebagai berikut.

- a. SPI dibentuk dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan perusahaan seperti Administratur Perkebunan, keuangan, penjualan, produksi, pengolahan dan tanaman serta memberikan laporan, pendapat/saran kepada Direksi.

Susunan personalia SPI PD Perkebunan terdiri dari seorang kepala bagian SPI dan tiga orang anggota/staf, dengan komposisi dua orang berpendidikan Sarjana (S-1) dan satu orang berpendidikan Diploma (D-3).

- b. Satuan Pengawas Intern (SPI) PD Perkebunan belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya berdasarkan program kerja yang meliputi pengawasan umum dan pengawasan teknik yang terbagi dalam periode bulanan, namun lebih banyak melaksanakan tugas tambahan selain tugas utama yang antara lain:
 - 1) Pemantauan investasi yang dilakukan PDPPSU yaitu pembangunan PMKS.
 - 2) Survey dan negosiasi penambahan areal (pengembangan PDPPSU).
 - 3) Mendampingi Badan Pengawas dan Anggota DPRD yang melakukan inspeksi ke kebun-kebun.

5. Dana Pembinaan Yayasan dan Koperasi

Sejak tahun 2002, PDPPSU telah membantu perkembangan Yayasan PDPPSU yang didirikan tanggal 9 Juni 1995. Yayasan PDPPSU bergerak di bidang pendidikan. Tahun 2004 bantuan yang diberikan oleh yayasan Unit Tj. Kasau sebesar Rp74.400.000,00 atau Rp6.200.000,00 per bulan untuk SMP dan Madrasah Diniyah Aliyah serta beasiswa sebesar Rp26.250.000,00 sedangkan di Unit Patiluban berupa beasiswa sebesar Rp3.340.000,00.

PDPPSU juga memberikan kesempatan kepada koperasi untuk mengembangkan usaha yaitu menyediakan kendaraan pengangkutan produksi sawit dan karet, pekerjaan pemborongan pembuatan jalan dan saluran air serta pekerjaan pemeliharaan areal TBM dan TM. Selain itu

kepada koperasi telah diberikan kemudahan berupa pinjaman tanpa bunga yang realisasinya pada tahun 2004 sebesar Rp308.058.519,00.

6. Aspek Strategis

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, PDPPSU memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dan karyawan/wati untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan yang diadakan oleh PDPPSU sendiri maupun oleh institusi pendidikan dalam negeri yang antara lain melalui pendidikan short course dengan BPKP, pendidikan pajak brivet A dan B, juga pendidikan short course tentang perkebunan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**